



kota
tangerang
Smart • Inovative • Modern • E-City

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Tangerang
Tahun Anggaran 2021



STATISTIK SEKTORAL

KEMISKINAN MASYARAKAT

KOTA TANGERANG

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat menyelesaikan Buku Publikasi Data dan Statistik Sektor Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2021.

Dalam Buku Publikasi Data dan Statistik Sektor Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2021 menggambarkan beberapa indikator, antara lain banyaknya Garis Kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, Indikator ketidakmerataan pendapatan (Gini Ratio) serta rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jumlah penerima bantuan sosial Kota Tangerang tahun 2021 juga akan ditampilkan pada Buku Publikasi ini.

Kami berharap Buku Publikasi ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang. Kepada pihak Pemerintah Kota Tangerang, dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Tangerang, Oktober 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang**

Mulyani, SE, MM, AK,CA
NIP. 196708041987031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 METODOLOGI	6
2.1 Konsep Kemiskinan	6
2.2 Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin	9
2.3 Persentase Penduduk Miskin, Kedalaman, dan Keparahan Kemiskinan	12
2.4 Gini Ratio dan Kepentingan Pendapatan.....	13
BAB 3 KEMISKINAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN	15
3.1 Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin.....	15
3.2 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin.....	16
3.3 Kedalaman (PI) dan Keparahan (P2) Kemiskinan	19
3.4 Gambaran Umum Perekonomian dan Distribusi Pendapatan	20
BAB 4 DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2020-2021	24
4.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	24

4.1.1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	27
4.1.2	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Tingkat Pendidikan..	29
4.1.3	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020	31
4.2	Status Kesejahteraan Sosial per Kecamatan di Kota Tangerang.....	34
4.2.1	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Batuceper	36
4.2.2	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Benda	38
4.2.3	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Cibodas	39
4.2.4	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Ciledug	41
4.2.5	Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Cipondoh	43
4.2.6	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung	45
4.2.7	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah	46
4.2.8	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Karawaci.	48
4.2.9	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Larangan.	49
4.2.10	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Neglasari.	51
4.2.11	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Pinang.	53
4.2.12	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Periuk..	54
4.2.13	Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Tangerang	56
4.3	Bantuan Sosial Tunai.....	57

4.4	Program Keluarga Harapan	60
4.5	Bantuan Pangan Non-Tunai	62
4.6	Penerima Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai Beras	64
BAB 5	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Propinsi Banten dan Perkembangan inflasi Kota Tangerang Tahun 2015 – 2020.....	15
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang.....	17
Tabel 3.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Banten 2018/2020	20
Tabel 3.4 Gini Rasio Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2017/2020.....	22
Tabel 4.1 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Periode Oktober 2020-2021	25
Tabel 4.2 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin.....	27
Tabel 4.3 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Tingkat Pendidikan	29
Tabel 4.4 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Jenis Pekerjaan.....	31
Tabel 4.5 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Rumah Tangga per Kecamatan di Kota Tangerang.....	35
Tabel 4.6 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Batucapeper.....	36
Tabel 4.7 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Benda	38
Tabel 4.8 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cibodas	39
Tabel 4.9 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Ciledug	41
Tabel 4.10 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cipondoh.....	43
Tabel 4.11 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung	45

Tabel 4.12 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah.....	46
Tabel 4.13 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karawaci	48
Tabel 4.14 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Larangan.....	49
Tabel 4.15 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Neglasari	51
Tabel 4.16 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Pinang	53
Tabel 4.17 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Periuk	54
Tabel 4.18 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Tangerang.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2018 s/d 2020	18
Gambar 4.1 Grafik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin per Kecamatan.....	28
Gambar 4.2 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin	28
Gambar 4.3 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Tingkat Pendidikan.....	30
Gambar 4.4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Tingkat Pendidikan.....	30
Gambar 4.5 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Pekerjaan..	32
Gambar 4.6 Persentase Status Kesejahteraan Sosial di Kota Tangerang.....	35
Gambar 4.7 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Batuceper.....	37
Gambar 4.8 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Batuceper.....	37
Gambar 4.9 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Benda	38
Gambar 4.10 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Benda.....	39
Gambar 4.11 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cibodas.....	40
Gambar 4.12 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cibodas.....	40
Gambar 4.13 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Ciledug	41
Gambar 4.14 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Ciledug	42

Gambar 4.15 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cipondoh.....	43
Gambar 4.16 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cipondoh.....	44
Gambar 4.17 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung	45
Gambar 4.18 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung	46
Gambar 4.19 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah.....	47
Gambar 4.20 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah.....	47
Gambar 4.21 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karawaci	48
Gambar 4.22 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Larangan.....	50
Gambar 4.23 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Larangan.....	50
Gambar 4.24 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Neglasari	51
Gambar 4.25 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Neglasari	52
Gambar 4.26 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Pinang.....	53
Gambar 4.27 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Pinang.....	54
Gambar 4.28 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan Kecamatan Periuk	55
Gambar 4.29 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Periuk	55

Gambar 4.30 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan Kecamatan Tangerang.....	56
Gambar 4.31 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Tangerang.....	57
Gambar 4.32 Persentase Penerima Bantuan Sosial Tunai Tahap I hingga Tahap IV	60
Gambar 4.33 Grafik Penerima PKH per Kecamatan Periode Januari-Februari Tahun 2021.....	62
Gambar 4.34 Persentase Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Periode Januari-Juni 2021.....	64
Gambar 4.35 Grafik Penerima PKH dan BST Beras selama PPKM per Kecamatan Tahun 2021	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya setiap negara yang melakukan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu orientasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu cita-cita mulia dalam deklarasi *Milenium Development Goals (MDG's)* hasil dari kesepakatan kepala Negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 lalu diperkuat dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia, dengan target salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Didalam dokumen *SDG's* memuat tujuan antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan .

Masalah kemiskinan hingga saat ini menjadi salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat

bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic* dimana keadaan sumber daya dialokasikan untuk penggunaan bernilai tertinggi di dalam perekonomian.

Kemiskinan tidak bisa dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau satu indikator saja. Kemiskinan sangat kompleks, sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi. Gambaran kemiskinan di Kota Tangerang dalam Buku Publikasi ini ditampilkan dalam beberapa indikator, antara lain banyaknya Garis Kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, Indikator ketidakmerataan pendapatan (*Gini Ratio*) serta rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jumlah penerima bantuan sosial Kota Tangerang tahun 2021 juga akan ditampilkan pada Buku Publikasi ini.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penyusunan Buku Publikasi Data dan Statistik Sektor Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk menyediakan informasi dan memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*), indikator pemerataan pendapatan atau *Gini Coefficient (Gini Ratio)*. Untuk para pembuat kebijakan di daerah, kemiskinan jika dilihat dari sudut pandang tersebut seringkali lebih relevan dibandingkan dengan kemiskinan dari sudut pandang pendapatan, sehingga memberikan perhatian lebih fokus pada penyebab kemiskinan dan terkait secara langsung dengan strategi pemberdayaan dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa informasi yang disajikan dalam hal ini adalah sbb:

1. Gambaran perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin sebagai basis data indikator kemiskinan absolut.
2. Estimasi indikator kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*).
3. Estimasi indikator pemerataan pendapatan, yaitu *Gini Coefficient (Gini Ratio)*.
4. Gambaran Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jumlah penerima bantuan sosial

1.3 Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam analisis Kemiskinan pada Buku Publikasi Data dan Statistik Sektor Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 ini bersumber dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Konsumsi dan KOR Tahun 2020 dan SUSENAS Modul Konsumsi tahun sebelumnya.

Selain data SUSENAS, sumber data lainnya yang digunakan untuk keperluan analisis adalah dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Data hasil SPKKD memberikan informasi mengenai jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi secara sangat rinci sehingga dapat diketahui untuk komoditi pakaian misalnya, item pakaian seperti apa yang menjadi kebutuhan pokok (apakah termasuk pakaian dalam anak-anak, topi dan sebagainya).

Dengan demikian SPKKD memberikan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Sedangkan data SUSENAS memberikan perkiraan besarnya nilai kebutuhan pokok berdasarkan proporsi pengeluaran hasil SPKKD tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Buku Publikasi Data dan Statistik Kemiskinan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2. Metodologi

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep, definisi, data dan formula dari indikator yang disusun dalam Buku publikasi ini.

Bab 3. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan

Bab ini berisi gambaran kemiskinan berupa jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, gambaran umum tentang pendidikan dan pekerjaan penduduk miskin serta gambaran umum tentang ketidakmerataan pendapatan (Indeks Gini Ratio).

Bab 4. Rekapitulasi DTKS Dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kota Tangerang Tahun 2021

Bab ini berisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin tingkat pendidikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis pekerjaan, Status Kesejahteraan Sosial per Kecamatan, Bantuan Sosial Tunai (BST), Penerima Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Penerima Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai Beras.

Bab 5. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan dari Buku Publikasi Data dan Statistik Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 ini.

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Konsep Kemiskinan

Menurut World Bank, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (BPS, 2015). Sedangkan konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK).

Menurut Kementerian Sosial, Konsep kemiskinan menurut perspektif orang miskin adalah kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dimaknai sebagai ketiadaan pekerjaan/keterbatasan peluang kerja, ketidakpastian penghasilan, keterbatasan keahlian/keterampilan, keterbatasan aset/modal serta keterbatasan dalam mengakses pelayanan penting seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, sanitasi yang sehat seperti air bersih dan lingkungan yang sehat, serta fasilitas kredit untuk pengembangan usaha. Sedangkan konsep Kemiskinan dalam perspektif stakeholder merujuk pada pengertian kemiskinan yang tidak hanya dilihat dari sisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendefinisikan kemiskinan dari aspek sumber daya manusia, faktor pendidikan, etos kerja yang rendah atau malas, dan faktor alam yang memungkinkan seseorang menjadi miskin.

Berdasarkan cara pendekatannya, ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai “inability of the individual to meet basic needs” (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah “the failure to have certain minimum capabilities”. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin. Perhitungan penduduk miskin di Indonesia pada dasarnya mengikuti konsep di atas.

Menurut definisinya, terdapat empat definisi kemiskinan yang digunakan saat ini, yaitu:

- 1. Kemiskinan absolut** : kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan). Dapat dikatakan pula kemiskinan absolut adalah orang atau rumah tangga yang berada atau hidup di bawah standar minimal kehidupan. Standar ini dikenal dengan sebutan Garis Kemiskinan (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin. Sehingga orang atau rumah tangga yang berada di bawah GK masuk dalam kelompok miskin. Konsep atau definisi ini bersifat mutlak tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, budaya, kondisi ataupun status sosialnya.
- 2. Kemiskinan relatif** : kemiskinan adalah kondisi seseorang atau rumah tangga yang masih jauh lebih rendah kondisinya dibandingkan keadaan masyarakat sekitar. Seseorang atau rumah tangga berada dalam keadaan miskin meskipun sesungguhnya sudah berada di atas standar minimal (GK). Dalam hal ini Garis Kemiskinan sudah tidak menjadi pembatas lagi, karena kebutuhan minimal hidup orang atau rumah

tangga ini sudah tidak hanya pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan saja, tetapi sudah masuk unsur gaya hidup, diantaranya unsur kualitas makanan, hiburan, komunikasi, dsb. Konsep atau definisi ini mengandung dimensi ketimpangan di dalamnya.

3. **Kemiskinan subyektif** : kemiskinan adalah kondisi atau status sosial seseorang atau rumah tangga yang memenuhi kriteria-kriteria miskin tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria ini dapat berupa kriteria yang obyektif melalui kajian ataupun tidak, seperti yang telah umum digunakan oleh masyarakat kita, misalnya janda, jompo, anak yatim, pengangguran, orang cacat, guru ngaji, dsb. Sehingga orang atau rumah tangga yang di dalamnya terdapat orang yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, masuk ke dalam kelompok miskin.
4. **Budaya kemiskinan** : kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk dapat secara mandiri memperbaiki kondisi kehidupannya. Sehingga orang atau rumah tangga ini sulit untuk dapat lepas dari lingkaran kemiskinan-pemiskinan (budaya kemiskinan). Konsep atau definisi ini mengandung dimensi yang lebih luas karena tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial budaya. Karena kemiskinan kultural dapat disebabkan oleh faktor alami maupun tidak. Kultur/budaya atau pola pikir seseorang atau masyarakat merupakan faktor alami dari budaya kemiskinan. Sedangkan kesalahan strategi atau kebijakan pembangunan yang menyebabkan tertutupnya atau bahkan matinya kesempatan seseorang untuk dapat memperbaiki kondisi hidupnya merupakan faktor bukan alami budaya kemiskinan.

Di dalam publikasi ini hanya menampilkan data atau indikator yang berpijak pada tiga konsep pertama (kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan subyektif) saja. Sedangkan budaya kemiskinan tidak disajikan, karena sulitnya menemukan indikator yang tepat dan berkesinambungan untuk dapat menggambarkan kondisi tersebut.

2.2 Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin

Berbeda dengan penentuan garis kemiskinan (GK) yang digunakan oleh Bank Dunia (pendapatan per kapita per hari US\$ 1,25 untuk kategori negara low income atau US\$ 2 untuk negara dengan kategori lower middle income), perkembangan tingkat kemiskinan dengan menggunakan konsep absolut yang digunakan oleh BPS perlu mendapatkan perhatian secara seksama, karena dua alasan.

Pertama, standar kemiskinan (GK) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis, untuk menyesuaikan dengan perkembangan pola konsumsi penduduk kelas bawah, khususnya untuk standar kecukupan non makanan (perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan untuk standar kecukupan makanan sampai saat ini masih dianggap ideal yaitu setara dengan 2100 kalori per kapita per hari (rekomen-dasi Widyakarya Pangan dan Gizi 1978).

Kedua, standar kemiskinan sangat sensitif terhadap gejolak harga-harga (inflasi) kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan. Ketika harga-harga naik, GK juga meningkat sesuai dengan kenaikan nilai yang dibayar penduduk kelas bawah untuk memenuhi standar minimal kebutuhan dasarnya (makanan, perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan).

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Formula garis kemiskinan dapat dinyatakan sbb:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM: Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis Kemiskinan (GK) dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas GKS. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang diinflat dengan inflasi umum (IHK). GK dibagi ke dalam dua bagian yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan GKM berasal dari data Susenas Panel dan Susenas

Modul Konsumsi data yang rinci mengenai pengeluaran konsumsi baik dalam bentuk kuantitas maupun nilai terutama untuk 52 komoditi dasar makanan, sehingga nilai pengeluaran makanan setara 2100 kalori dapat diestimasi secara tepat. Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Tentukan penduduk referensi, yaitu penduduk yang hidup sedikit di atas GK. Setelah itu dihitung nilai pengeluaran (V) dan kalori (K) untuk seluruh pengeluaran 52 komoditi makanan dari penduduk referensi. Kemudian dihitung nilai/harga rata-rata per kalori (H) dengan cara membagi nilai pengeluaran (V) dengan kalori (K) dan terakhir di hitung GK untuk makanan, yaitu nilai pengeluaran setara 2100 kalori ($H \cdot 2100$).
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Nilai kebutuhan minimum untuk komoditi non makanan meliputi perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan dihitung dengan mengalikan suatu rasio komoditi/sub kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub kelompok (r) dengan nilai pengeluaran sub kelompok (V) tersebut. Rasio (r) ini diperoleh dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) dan terakhir dilakukan pada tahun 2004. GK non makanan merupakan nilai total dari hasil perkalian ($r \cdot V$) tersebut.

GK merupakan penjumlahan dari GK makanan dan GK non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin diperoleh dengan cara memotong/membatasi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang kurang dari GK setelah data mentah (*raw data*) diurutkan terlebih dahulu dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang terkecil hingga terbesar.

2.3 Persentase Penduduk Miskin, Kedalaman, dan Keparahan Kemiskinan

Setelah jumlah penduduk miskin diperoleh, maka selanjutnya dihitung persentase penduduk miskin berdasarkan penduduk Susenas Kor sebagai nilai persentil untuk menghitung GK. Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Ukuran tersebut terdiri dari 3 indikator yaitu :

1. **Head Count Index/HCI (P_0)** yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah GK. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.
2. **Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*/ P_1)** yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK). Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

3. Keparahan kemiskinan (*Poverty Serevity Index/P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin.

Rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{GK - y_i}{gk} \right)^a$$

Dimana :

$a = 0, 1, 2$. Jika

$a = 0$ diperoleh *Head Count Index (Po)*,

$a = 1$ diperoleh *Poverty Gap Index (P1)*,

$a = 2$ diperoleh *Poverty Serevity Index (P2)*.

GK = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots q$), $y_i < GK$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

N = Jumlah penduduk.

2.4 Gini Ratio dan Kepentingan Pendapatan

Kriteria Bank Dunia membagi distribusi pendapatan menjadi tiga kelompok, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah (miskin), 40 persen penduduk berpendapatan menengah (kaya) dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (terkaya).

Kriteria *relative inequality* berdasarkan kriteria Montek S. Ahluwalia atau Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan dianggap parah apabila 40 persen penduduk berpenghasilan rendah menikmati kurang dari 12 persen Produk domestik.
2. Ketidakmerataan dianggap moderat apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati 12-17 persen Produk domestik.
3. dan apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17 persen produk domestik maka ketimpangan atau kesenjangan dinyatakan lunak.

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan *Gini Ratio* dimana nilai *indeks Gini* ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai *indeks gini* nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. *Gini Ratio* menurut H. T. Oshima diartikan sebagai berikut, ketimpangan rendah (*low*) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4 dan tinggi (*high*) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael P. Todaro distribusi pendataan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7.

BAB 3

KEMISKINAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

3.1 Garis Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli makanan yang mengandung 2100 kkal perhari dan keperluan mendasar bukan makanan, dalam satu bulan. Penduduk dengan pengeluaran perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin, secara fisik sering ditandai dengan menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk dan berpendidikan rendah. Ciri orang miskin lainnya adalah biasanya bekerja dengan memperoleh penghasilan yang minim, bekerja di sektor informal maupun buruh serabutan, dengan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja.

Tabel 3.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Propinsi Banten dan Perkembangan ini Kota Tangerang Tahun 2015 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab Pandeglang	247.073	267.752	285.822	310.859	326.517	361.712
2	Kab Lebak	228.146	246.389	261.88	283.901	298.201	334.509
3	Kab Tangerang	372.431	405.902	423.486	451.325	476.636	520.741
4	Kab Serang	232.856	256.66	269.652	294.829	309.036	341.074
5	Kota Tangerang	455.228	496.349	508.551	556.782	584.318	632.835
6	Kota Cilegon	323.935	347.949	373.147	428.867	459.469	504.571
7	Kota Serang	255.614	281.926	296.819	350.237	379.641	411.595
8	Kota Tangerang Selatan	433.967	472.968	494.784	549.150	593.781	643.083
Provinsi Banten		356.436	367.949	386.753	431.069	462.726	361.712

Sumber: BPS Kota Tangerang

Tabel 3.1 memperlihatkan garis kemiskinan penduduk Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Dimana pada tahun 2020 garis kemiskinan (GK) Kota Tangerang sebesar Rp 632.835 sedangkan Banten tercatat Rp 361.712 Memaknai garis kemiskinan sebesar Rp 632.835 perbulan yakni apabila suatu rumah tangga dengan anggota rumah tangga 2 orang anak, ayah, ibu dan mertua yang tinggal di rumah tersebut pengeluaran rumah tangga setiap bulannya kurang atau dibawah $5 \times \text{Rp } 632.835 = \text{Rp } 3.164.175$ maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin, berbeda apabila dirumah tangga tersebut hanya terdiri dari 1 orang anak dan 1 orang ibu akan dikatakan miskin apabila pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 1.168.636. Dengan kata lain batas pengeluaran rumah tangga miskin akan bervariasi tergantung pada jumlah anggota rumah tangganya.

Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan bervariasi selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, baik secara persentase maupun secara jumlah. Secara persentase, kenaikan tersebut berturut-turut besarnya adalah 7,98 persen, 9,01 persen, 2,64 persen, 9,48 persen, 4,94 persen dan 8,30 persen. Sedangkan secara jumlah, besarnya kenaikan tersebut secara berturut-turut adalah 0,22 persen, 0,70 persen, 2,95 persen, 0,43 persen, 0,76 persen, akibat dari dampak pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berimbas negative terhadap kenaikan Garis Kemiskinan di Kota Tangerang.

3.2 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin

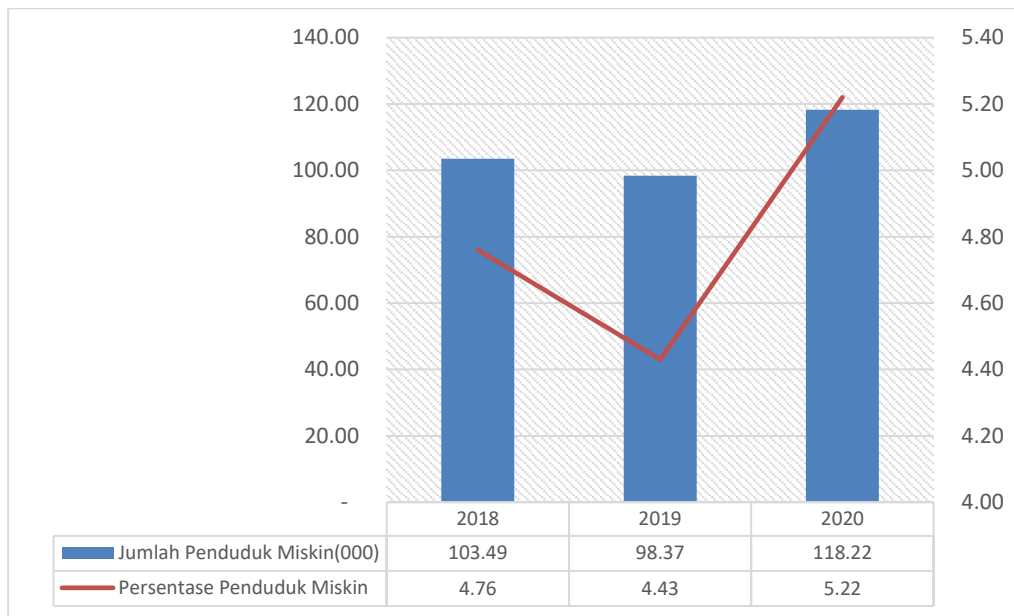
Jumlah dan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 103,488, tahun 2019 sebesar 98,37, tahun 2020 sebesar 118,22 dan memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 4,76 persen, tahun 2019 sebesar 4,43 dan tahun 2020 sebesar 5,22.

Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin(000)			Persentase Penduduk Miskin		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	116.155	114.09	120.44	9.61	9.42	9,92
Kab Lebak	108.815	107.93	120.83	8.41	8.30	9,24
Kab Tangerang	190.054	193.97	242.16	5.18	5.14	6,23
Kab Serang	64.456	61.54	74.80	4.3	4.08	4,94
Kota Tangerang	103.488	98.37	118.22	4.76	4.43	5,22
Kota Cilegon	13.964	13.20	16.31	3.25	3.03	3,69
Kota Serang	36.211	36.21	42.24	5.36	5.28	6,06
Tangerang Selatan	28.212	29.16	40.99	1.68	1.68	2,29
Provinsi Banten	661.355	654.46	775.99	5.24	5.09	5,92

Sumber : BPS Kota Tangerang

Terlihat bahwa persentase Urutan pertama Kota Tangsel dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,29 persen, Kota Cilegon pada urutan ke 2 dengan persentase sebesar 3,69 persen, Kabupaten Serang pada urutan ke 3 dengan persentase 4,94 persen dan urutan ke 4 Kota Tangerang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5,22 persen. Disusul berturut-turut Kota Serang, Kab Tangerang, Kabupten Lebak dan urutan terakhir Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 9,92 persen.



Gambar 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2018 s/d 2020

Grafik 3.1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dimana selalu terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2018 s/d 2020 berfluktuasi baik jumlah maupun persentasenya.

Naik dan turunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang ini sebagai peringatan bahwa Pemerintah harus semakin serius dan fokus dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin terlebih kalau kita cermati lebih jauh tidak sedikit penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sehingga sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar dari kemiskinan tetap juga tidak sedikit yang masuk menjadi miskin. Sebaiknya program - program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah

garis kemiskinan. Pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila kemiskinan makro dan mikro disandingkan, intervensi pada kelompok sasaran yaitu kelompok 40 persen terbawah.

3.3 Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

Mengukur kemiskinan tidak cukup hanya melihat penambahan dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Karenanya dalam upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK). Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan untuk melihat variasi pengeluaran diantara penduduk miskin yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan di antara penduduk miskin dapat dilihat dari **Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)**. Semakin tinggi nilai Indeks ini maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin, sebaiknya apabila ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu adalah nol atau tidak ada ketimpangan.

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 0,84 kemudian mengalami penurunan sebesar 0,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,74, dikarenakan Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga membuat ketimpangan sedikit meningkat dari tahun lalu. indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 0,84 kemudian mengalami penurunan sebesar 0,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,74, dikarenakan Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga membuat ketimpangan sedikit meningkat dari tahun lalu.

Tabel 3.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Banten 2018/2020

No	Kabupaten/Kota	Kedalaman Kemiskinan(P1)			Keparahan Kemiskinan(P2)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Pangeglang	1,31	1,33	1	0,29	0,28	0,16
2	Lebak	1,26	0,97	1,14	0,29	0,21	0,24
3	Tangerang	0,82	0,69	0,95	0,20	0,14	0,22
4	Serang	0,80	0,65	0,40	0,22	0,16	0,05
5	Kota Tangerang	0,84	0,64	0,74	0,24	0,15	0,15
6	Kota Cilegon	0,59	0,34	0,39	0,18	0,07	0,06
7	Kota Serang	0,60	0,51	0,59	0,10	0,11	0,10
8	Kota Tangerang Selatan	0,22	0,27	0,31	0,05	0,07	0,08
Banten		0,82	0,76	1	0,20	0,18	0,23

Sumber : BPS Kota Tangerang

Sedangkan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Tabel 3.6 terlihat bahwa nilai indeks, pada tahun 2018 pengeluaran diantara penduduk miskin bernilai indeks 0,17 meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,24 dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,15 menggambarkan penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin semakin merata. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin begitu pula sebaliknya.

3.4 Gambaran Umum Perekonomian dan Distribusi Pendapatan

Kemiskinan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan perekonomian baik skala makro maupun mikro. Bagi suatu wilayah setingkat kabupaten/kota biasanya perkembangan ekonomi diukur dari naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun. Semakin besar pertumbuhan PDRB-nya maka diasumsikan semakin baik pula perkembangan ekonominya. Perkembangan ekonomi yang semakin baik akan berdampak pada makin sejahteranya masyarakat, dengan catatan bahwa distribusi pendapatan tersebut terbagi merata.

Pada kondisi tertentu peningkatan PDRB tidak berkorelasi dengan penurunan atau kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebenarnya masalah yang mendasar bukan bagaimana meningkatkan PDRB, tetapi lebih kepada siapa yang menumbuhkan/meningkatkan PDRB, apakah sebagian besar masyarakat atautkah hanya beberapa gelintir saja. Jika yang berperan menumbuhkan PDRB hanya pengusaha kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan itupun hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, sehingga kemiskinan maupun ketimpangan semakin parah. Lain halnya jika pertumbuhan itu dihasilkan oleh orang banyak, maka mereka pulalah yang memperoleh manfaat terbesarnya dan buah dari pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata.

Ada berbagai tolak ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain *Kurva Conrad Lorenz*, *Corrado Gini Coeffisient*, *Kuznets Index*, *Oshima Index* dan *Theil Decomposition Index*. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah *Gini Coeffisient* atau lebih dikenal dengan nama *Gini Ratio* (GR). Angka *Gini Ratio* menurut H. T. Oshima:

1. ketimpangan rendah (*low*) bila GR kurang dari 0,3;
2. ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4
3. Ketimpangan tinggi (*high*) bila GR lebih dari 0,4.

Angka *Gini Ratio* menurut Michael P. Todaro:

1. Distribusi pendapatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai 0,35
2. Relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5
3. Timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2020 *Gini Rasio* (GR) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berada pada ketimpangan tertinggi Kota Cilegon sebesar 0,373, urutan kedua Kota Tangerang Selatan sebesar 0,368, urutan ke tiga Kota Serang sebesar 0,352,

urutan keempat Kota Tangerang sebesar 0,352 dilanjutkan urutan ke 5 Kab Lebak sebesar 0,314, urutan ke enam Kab Pandeglang sebesar 0,31, ke tujuh Kab Serang sebesar 0,303 dan terendah Kab Tangerang sebesar 0,285.

Pada tabel 3.4 Kota Tangerang mengalami kenaikan *Gini Rasio* (GR) yang sebelumnya sebesar 0,328 pada tahun 2019 menjadi 0,339 pada tahun. Menurut Michael P. Todaro bila GR antara 0,2 sampai 0,35 ketimpangannya masih dalam kategori rendah, Sedangkan Menurut H. T. Oshima ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4.

Tabel 3.4 Gini Rasio Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2017/2020

No	Kabupaten/Kota	Gini Rasio			
		2017	2018	2019	2020
1	Pangeglang	0,279	0,319	0,31	0,31
2	Lebak	0,268	0,303	0,297	0,314
3	Tangerang	0,329	0,342	0,325	0,285
4	Serang	0,285	0,284	0,305	0,303
5	Kota Tangerang	0,343	0,33	0,328	0,339
6	Kota Cilegon	0,341	0,352	0,315	0,373
7	Kota Serang	0,358	0,351	0,342	0,352
8	Kota Tangerang Selatan	0,361	0,379	0,331	0,368
Banten		0,382	0,385	0,365	0,363

Sumber : BPS Kota Tangerang

Pola distribusi pendapatan yang didasarkan pada hasil penghitungan Gini Ratio barulah menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara garis besar. Apakah merata miskin atau merata menengah? Berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok penduduk berpendapatan rendah/miskin? Gini Ratio tidak dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, Gini Ratio perlu disandingkan dengan indikator lain yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*). Indikator lain tersebut adalah yang disebut *relative inequality*. *Relative inequality* diartikan sebagai ketimpangan

dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai kelas atau kelompok masyarakat. Relative inequality dan absolute poverty merupakan dua aspek kembar keadilan dalam proses pemerataan pembangunan atau pemerataan pendapatan nasional/daerah.

Ketidakmerataan pendapatan Menurut Montek S. Ahluwalia atau Bank Dunia *relative inequality* berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan dianggap parah apabila 40 persen penduduk berpenghasilan rendah menikmati kurang dari 12 persen Produk domestik.
2. Ketidakmerataan dianggap moderat apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati 12-17 persen Produk domestik.
3. Apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17 persen produk domestik maka ketimpangan atau kesenjangan dinyatakan lunak.

BAB 4

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2020-2021

4.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

1. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar;
2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako);
3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Tabel 4.1 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Periode Oktober 2020-2021

KECAMATAN	2020			2021	
	RUMAH TANGGA	KEPALA KELUARGA	INDIVIDU	KEPALA KELUARGA	INDIVIDU
Batu Ceper	4.661	5.258	15.210	7.439	53.463
Benda	7.063	8.079	25.001	8.810	63.786
Cibodas	5.461	6.571	19.839	10.683	71.631
Ciledug	6.481	7.256	23.249	9.220	65.140
Cipondoh	6.753	8.071	22.808	11.344	84.320
Jatiuwung	5.421	6.030	17.064	7.696	50.991
Karang Tengah	5.455	6.084	17.098	6.523	49.554
Karawaci	9.891	11.269	34.950	14.400	97.943
Larangan	5.333	6.337	18.987	8.743	59.146
Neglasari	10.778	12.920	40.029	11.166	90.614
Periuk	8.881	10.581	19.740	9.385	66.394
Pinang	5.941	6.897	30.656	11.873	93.173
Tangerang	6.468	7.607	21.894	11.510	79.593
TOTAL	88.587	102.960	306.525	128.792	925.748

SUMBER: Kemensos No.146/HUK/2020)

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa total keseluruhan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2020 sebanyak 498.072 Jiwa, yang terbagi berdasarkan kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Rumah Tangga dengan persentase sebanyak 17,78%, menurut Kepala Keluarga sebanyak 20,67%, dan menurut Individu sebanyak 61,54%. Sedangkan Kecamatan tertinggi yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2020 yaitu kecamatan Neglasari terdiri dari rumah tangga sebanyak 10.778 Jiwa, menurut Kepala Keluarga sebanyak 12.920 Jiwa, dan menurut Individu sebanyak 40.029 Jiwa, dengan persentase sebanyak 12,79%. Selain itu juga terdapat Kecamatan terendah yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu kecamatan Batu Ceper terdiri dari rumah tangga sebanyak 4.661 Jiwa, menurut kepala keluarga sebanyak 5.258 Jiwa, dan menurut Individu sebanyak 15.210 Jiwa, dengan persentase sebanyak 5,04%.

Total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tangerang tahun 2021 sebanyak 1.054.540 Jiwa, yang terbagi kategori menurut Kepala Keluarga sebanyak 12,21%, dan menurut Individu sebanyak 87,79%. Sedangkan Kecamatan tertinggi yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 yaitu Kecamatan Karawaci terbagi menurut kepala keluarga sebanyak 14.400 Jiwa, menurut Individu sebanyak 97.943 Jiwa, dengan persentase sebanyak 10,65%. Kecamatan terendah yang terdaftar pada DTKS tahun 2021 yaitu Kecamatan Karang Tengah, terbagi menurut kepala keluarga sebanyak 6.523 Jiwa dan menurut individu sebanyak 49.554 Jiwa dengan persentase sebanyak 5,31%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tahun 2020 sampai dengan 2021 di Kota Tangerang sebanyak 1.552.162 Jiwa, yaitu mengalami kenaikan sebesar 35,84% dari tahun sebelumnya, terbagi menjadi 3 kategori yaitu rumah tangga, kepala keluarga, dan individu, dimana dari ketiga kategori tersebut Individu merupakan kategori terbanyak yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan persentase sebanyak 79,37%.

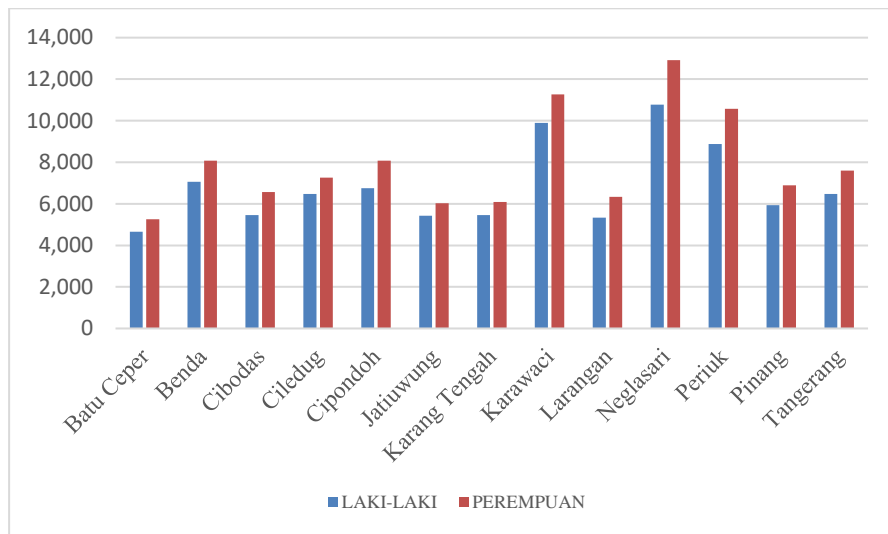
4.1.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut jenis kelamin pada tahun 2020 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat jenis kelamin nya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui total dan persentase dari data terpadu kesejahteraan sosial menurut jenis kelamin di Kota Tangerang. Oleh karena itu dibawah ini disajikan tabel dan grafik DTKS menurut jenis kelamin per Kecamatan, sebagai berikut:

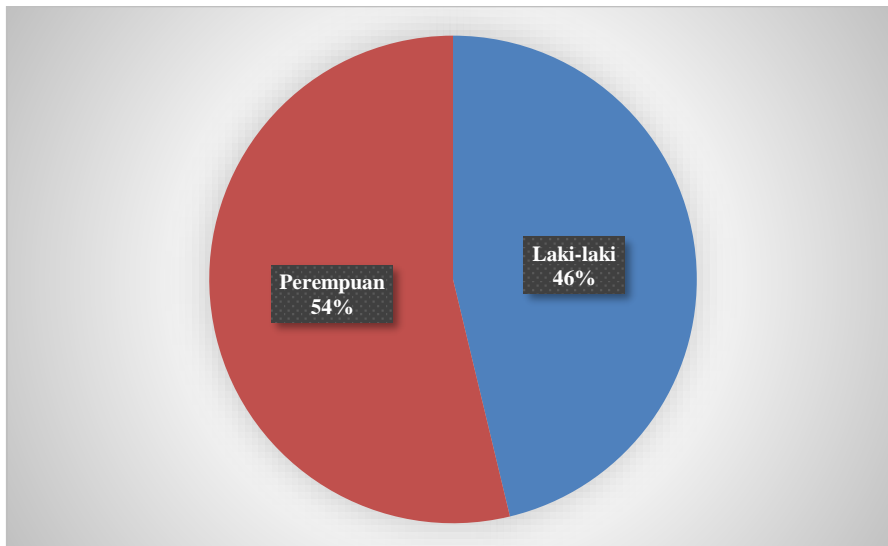
Tabel 4.2 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Batu Ceper	4.661	5.258
Benda	7.063	8.079
Cibodas	5.461	6.571
Ciledug	6.481	7.256
Cipondoh	6.753	8.071
Jatiuwung	5.421	6.030
Karang Tengah	5.455	6.084
Karawaci	9.891	11.269
Larangan	5.333	6.337
Neglasari	10.778	12.920
Periuk	8.881	10.581
Pinang	5.941	6.897
Tangerang	6.468	7.607
TOTAL	88.587	102.960

SUMBER: Kemensos No.146/HUK/2020)



Gambar 4.1 Grafik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin per Kecamatan



Gambar 4.2 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Kelamin

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin tahun 2020 sebanyak 191.547 Jiwa, dengan masing-masing Persentase laki-laki sebanyak 46% dan perempuan sebanyak 54%. Sedangkan Kecamatan tertinggi yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin yaitu Kecamatan Neglasari dengan total 23.698 Jiwa, yang terdiri dari 12,67% laki-laki dan 12,54% perempuan. Selain itu juga terdapat Kecamatan terendah yang terdaftar sebagai DTKS menurut jenis kelamin yaitu Kecamatan Batu Ceper dengan total 9.919 Jiwa, terdiri dari laki-laki 5,26% dan perempuan 5,11%.

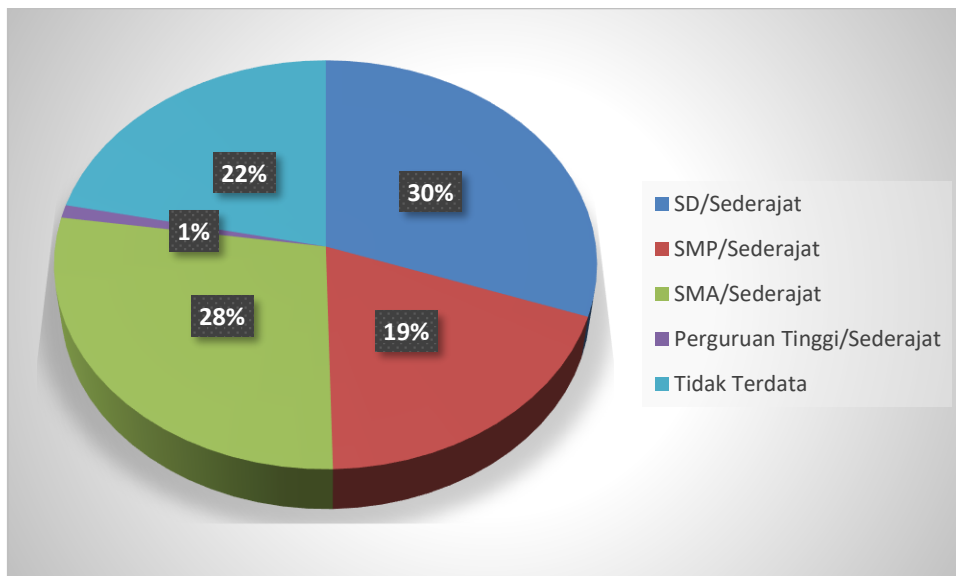
4.1.2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Tingkat Pendidikan

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat tingkat pendidikan nya yaitu SD/ Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi/Sederajat, dan yang tidak terdata. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui total dan persentase dari data terpadu kesejahteraan sosial menurut tingkat pendidikan di Kota Tangerang. Oleh karena itu dibawah ini disajikan tabel dan grafik DTKS menurut tingkat pendidikan per Kecamatan, sebagai berikut:

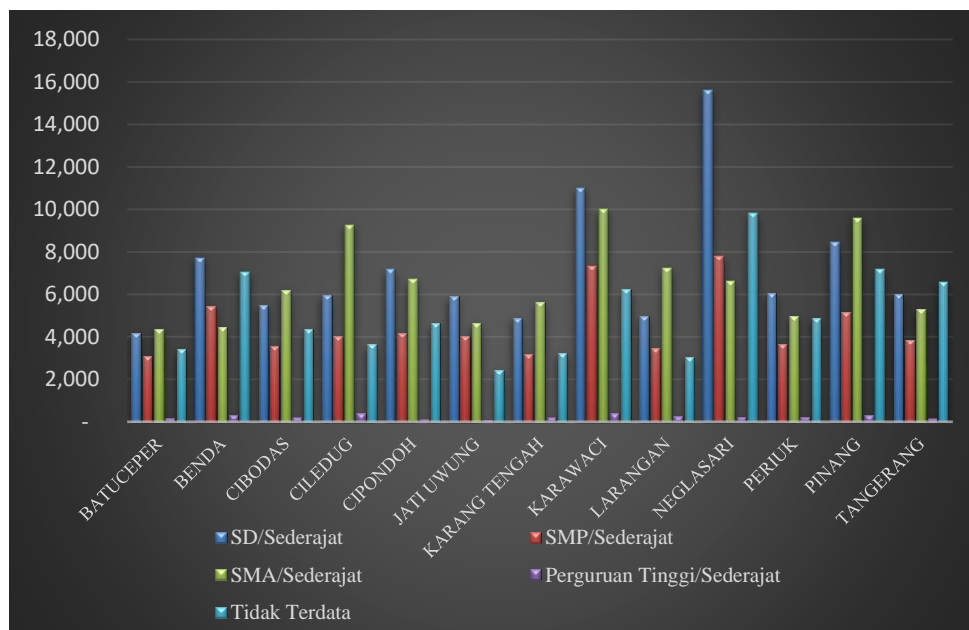
Tabel 4.3 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Tingkat Pendidikan

KECAMATAN	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi/Sederajat	Tidak Terdata
Batu Ceper	4.166	3.089	4.371	164	3.420
Benda	7.702	5.468	4.456	326	7.049
Cibodas	5.501	3.556	6.198	203	4.381
Ciledug	5.967	4.017	9.240	390	3.635
Cipondoh	7.169	4.180	6.694	148	4.617
Jatiuwung	5.897	4.024	4.642	85	2.416
Karang Tengah	4.879	3.184	5.607	208	3.220
Karawaci	10.997	7.306	10.011	410	6.226
Larangan	4.979	3.469	7.232	272	3.035
Neglasari	15.619	7.777	6.606	229	9.798
Periuk	6.044	3.658	4.954	209	4.875
Pinang	8.425	5.175	9.575	314	7.167
Tangerang	6.013	3.823	5.307	162	6.589
TOTAL	93.358	58.726	84.893	3,120	66.428

SUMBER: Kemensos No.146/HUK/2020)



Gambar 4.3 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Tingkat Pendidikan



Gambar 4.4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Tingkat Pendidikan

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020 yaitu SD/Sederajat 30%, SMP/Sederajat 19%, SMA/Sederajat 28%, Perguruan Tinggi/Sederajat 1%, dan tidak terdata 22%. Sehingga dari persentase tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan SD/Sederajat merupakan data tertinggi yang terdaftar dalam data DTKS, dan tingkat pendidikan terendah yang terdaftar dalam DTKS yaitu Perguruan Tinggi/Sederajat. Sedangkan Kecamatan tertinggi yang terdaftar sebagai Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial menurut tingkat pendidikan yaitu Kecamatan Neglasari dengan total 40.029 Jiwa, yang terdiri dari SD/Sederajat 16,73%, SMP/Sederajat 13,25%, SMA/Sederajat 7,78%, Perguruan Tinggi/Sederajat 7,34%, dan Tidak Terdata 14,75%. Selain itu juga terdapat Kecamatan terendah yang terdaftar sebagai DTKS menurut tingkat pendidikan yaitu Kecamatan Batuceper dengan total 15.210 Jiwa, terdiri dari SD/Sederajat 4,46%, SMP/Sederajat 5,26%, SMA/Sederajat 5,15%, Perguruan Tinggi/Sederajat 5,26%, dan Tidak Terdata 5,15%.

4.1.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut pekerjaan pada tahun 2020 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat status pekerjaannya, dimana status pekerjaan terdiri dari 9 jenis pekerjaan, diantaranya PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif, Pekerja Keluarga/Tidak dibayar, Pekerja bebas pertanian, Pekerja non pertanian, Buruh.Karywan/Pegawai Swasta, Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tetap Tidak Tetap/Tidak Dibayar, Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar, Tidak ada data.

Tabel 4.4 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Jenis Pekerjaan

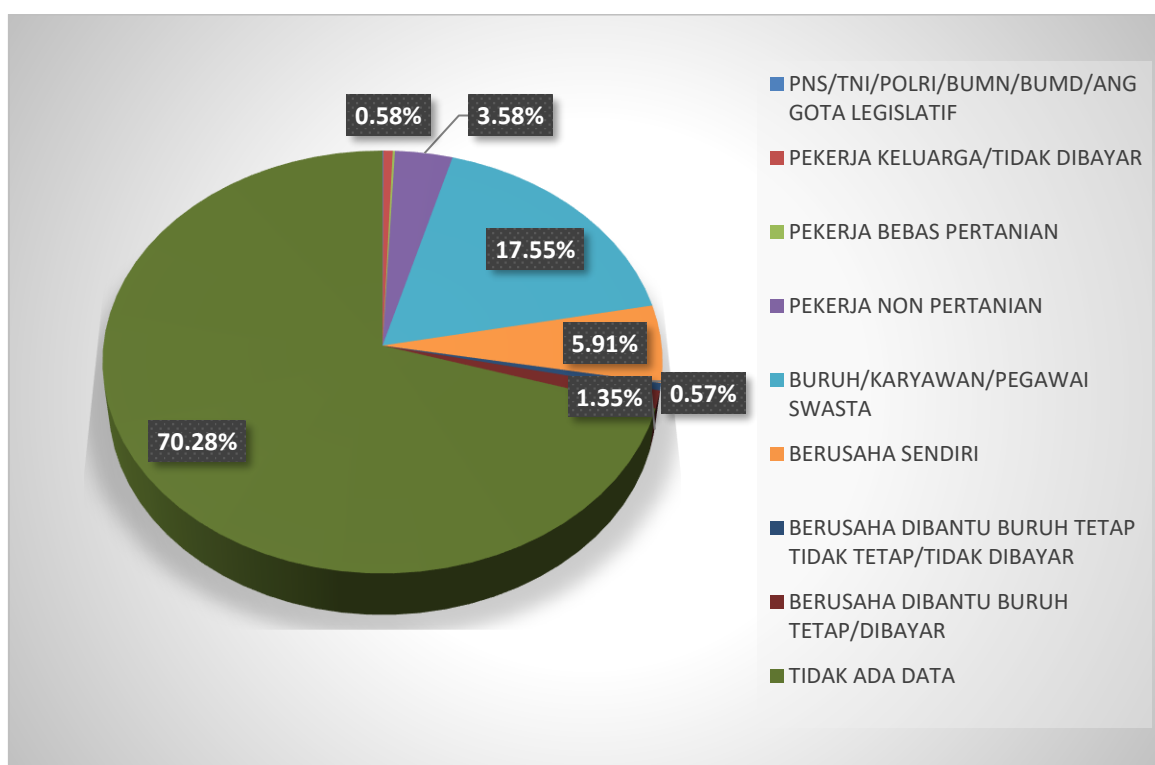
KECAMATAN	PNS/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/A ANGGOTA LEGISLATIF	PEKERJA KELUARGA/TI DAK DIBAYAR	PEKERJA BEBAS PERTANIAN	PEKERJA NON PERTANIAN	BURUH/KARYA WAN/PEGAWAI SWASTA
Batu Ceper	3	299	5	755	2.568
Benda	10	59	76	741	4.715
Cibodas	16	329	4	704	4.364
Ciledug	24	79	13	298	4.192
Cipondoh	10	34	35	998	3.639
Jatiuwung	2	35	18	707	3.512
Karang Tengah	10	28	31	441	3.067
Karawaci	12	129	44	1.678	5.118
Larangan	17	150	4	312	3.500
Neglasari	7	136	85	1.782	6.656
Periuk	7	76	51	364	3.973
Pinang	27	359	49	854	5.484
Tangerang	7	61	11	1.329	2.994
TOTAL	152	1.774	426	10.963	53.782

SUMBER: Kemensos No.146/HUK/2020)

Lanjutan Tabel 4.4. Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per Kecamatan menurut Jenis Pekerjaan

KECAMATAN	BERUSAHA SENDIRI	BERUSAHA DIBANTU BURUH		TIDAK ADA DATA
		TETAP/TIDAK DIBAYAR	TETAP/DIBAYAR	
Batu Ceper	932	110	385	10.153
Benda	863	68	135	18.334
Cibodas	1.238	41	140	13.003
Ciledug	2.085	265	564	15.729
Cipondoh	1.485	131	325	16.151
Jatiuwung	831	117	120	11.722
Karang Tengah	1.185	141	356	11.839
Karawaci	1.789	265	387	25.528
Larangan	1.800	126	276	12.802
Neglasari	1.576	173	959	28.655
Periuk	1.251	54	120	13.844
Pinang	2.038	172	327	21.346
Tangerang	1.052	72	49	16.319
TOTAL	18.125	1.735	4.143	215.425

SUMBER: Kemensos No.146/HUK/2020)



Gambar 4.5 Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Pekerjaan

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut pekerjaan tahun 2020 terdiri dari PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif 0,05%, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar 0,58%, Pekerja Bebas Pertanian 0,14%, Pekerja Non Pertanian 3,58%, Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta 17,55%, Berusaha Sendiri 5,91%, Berusaha Dibantu Buruh Tetap Tidak Tetap/Tidak Dibayar 0,57%, Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar 1,35%, dan Tidak ada data 70,28%. Dari Persentase ini dapat diketahui dari data DTKS menurut pekerjaan bahwa sebanyak 70,28% tidak ada data nya (blank). Selain itu, dapat diketahui bahwa pekerjaan buruh/karyawan/pegawai swasta merupakan status pekerjaan tertinggi yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Kota Tangerang tahun 2020 dengan persentase 17,55%, sedangkan status pekerjaan terendah yang terdaftar di data DTKS yaitu PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif dengan persentase 0,05%.

4.2 Status Kesejahteraan Sosial per Kecamatan di Kota Tangerang

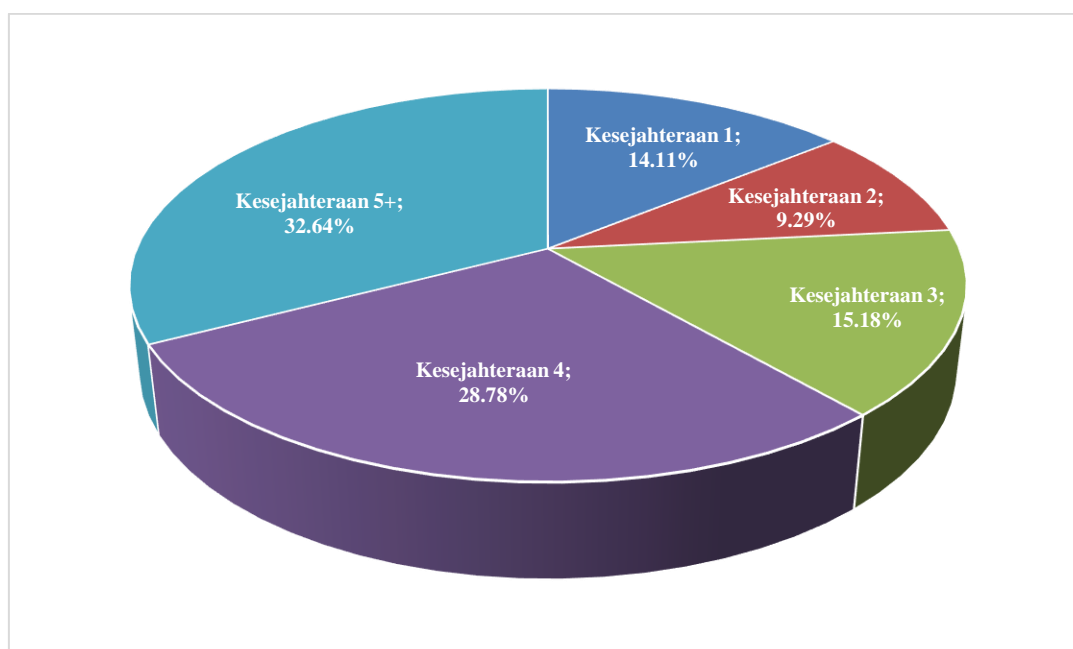
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan definisi tersebut maka kesejahteraan sosial merupakan keadaan untuk memenuhi semua kebutuhan dari mulai material dan spiritual sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan layak tanpa adanya halangan apapun. Kemudian status kesejahteraan sosial dibagi menjadi 5 indikator, yaitu:

1. **Status Kesejahteraan 1** : Sangat Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
2. **Status Kesejahteraan 2**: Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia)
3. **Status Kesejahteraan 3** : Hampir Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia)
4. **Status Kesejahteraan 4** : Rentan Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 31% - 40% terendah di Indonesia)
5. **Status Kesejahteraan 5** : Menuju Middle Class (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 41% + terendah di Indonesia)

Dari kelima indikator tersebut, maka diperoleh status kesejahteraan sosial di Kota Tangerang per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Rumah Tangga per Kecamatan di Kota Tangerang

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KECAMATAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
BATUCEPER	539	348	626	1.461	1.687
BENDA	1.215	541	950	1.976	2.381
CIBODAS	613	518	979	1.671	1.680
CILEDUG	541	564	1.023	1.915	2.438
CIPONDOH	877	570	917	1.547	2.004
JATIUWUNG	691	366	701	1.505	2.158
KARANG TENGAH	950	643	799	1.407	1.656
KARAWACI	1.799	1.105	1.564	2.673	2.750
LARANGAN	783	623	911	1.326	1.690
NEGLASARI	1.755	967	1.569	3.176	3.311
PINANG	988	816	1.408	2.646	3.023
PERIUK	637	413	803	2.002	2.086
TANGERANG	997	677	1.073	1.948	1.773
KOTA TANGERANG	12.385	8.151	13.323	25.253	28.637



Gambar 4.6 Persentase Status Kesejahteraan Sosial di Kota Tangerang

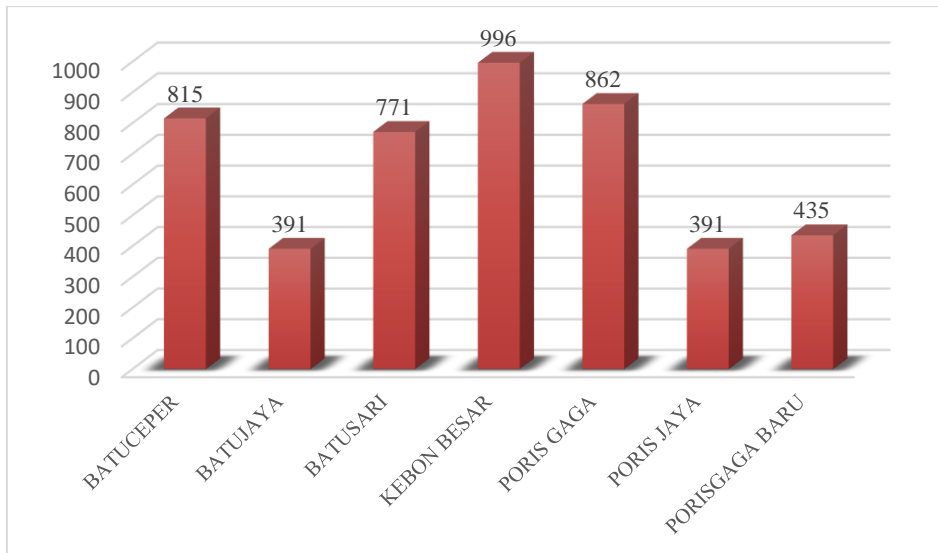
Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa status kesejahteraan sosial di Kota Tangerang tersebar di lima indikator, dimana indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu Kesejahteraan 5+ sebanyak 28.637 Jiwa dengan Persentase 32,64%. Kesejahteraan 5+ ini memiliki arti bahwa Kota Tangerang berada di posisi menuju Middle Class (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 41% + terendah di Indonesia). Sedangkan indikator yang memiliki nilai terendah yaitu Kesejahteraan 2 sebanyak 8.151 Jiwa dengan Persentase 9,29%. Hal ini berarti bahwa 9,29% penduduk Kota Tangerang termasuk dalam kategori Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia) yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Oleh karena itu, dibawah ini di sajikan status kesejahteraan sosial per-kelurahan di masing-masing kecamatan, sebagai berikut:

4.2.1 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Batuceper

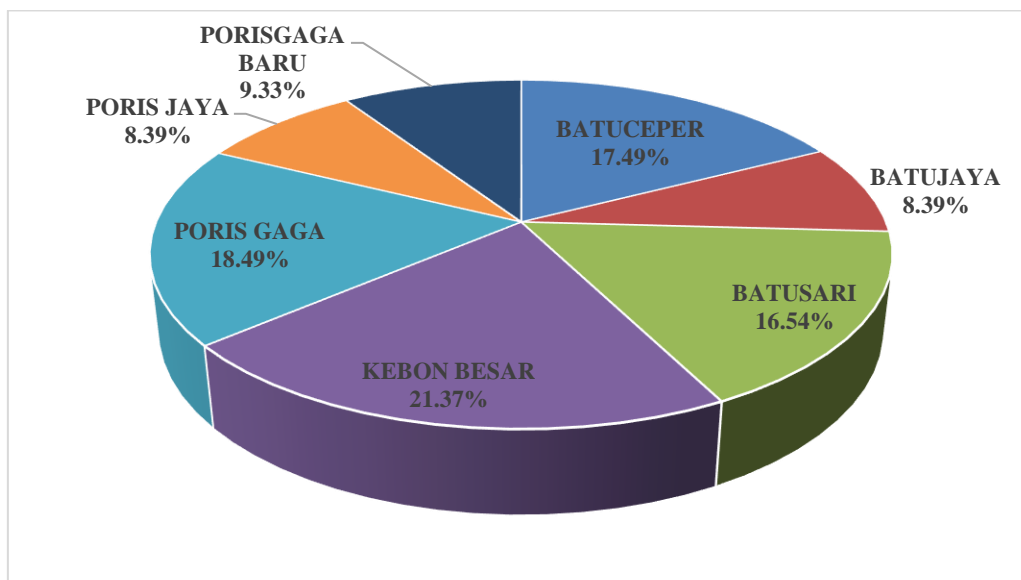
Tabel 4.6 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Batuceper

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
BATUCEPER	109	79	125	254	248
BATUJAYA	47	30	59	116	139
BATUSARI	29	28	93	240	381
KEBON BESAR	124	66	116	293	397
PORIS GAGA	154	77	135	274	222
PORIS JAYA	17	36	46	137	155
PORISGAGA BARU	59	32	52	147	145
KEC BATUCEPER	539	348	626	1.461	1.687

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.7 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Batuceper



Gambar 4.8 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Batuceper

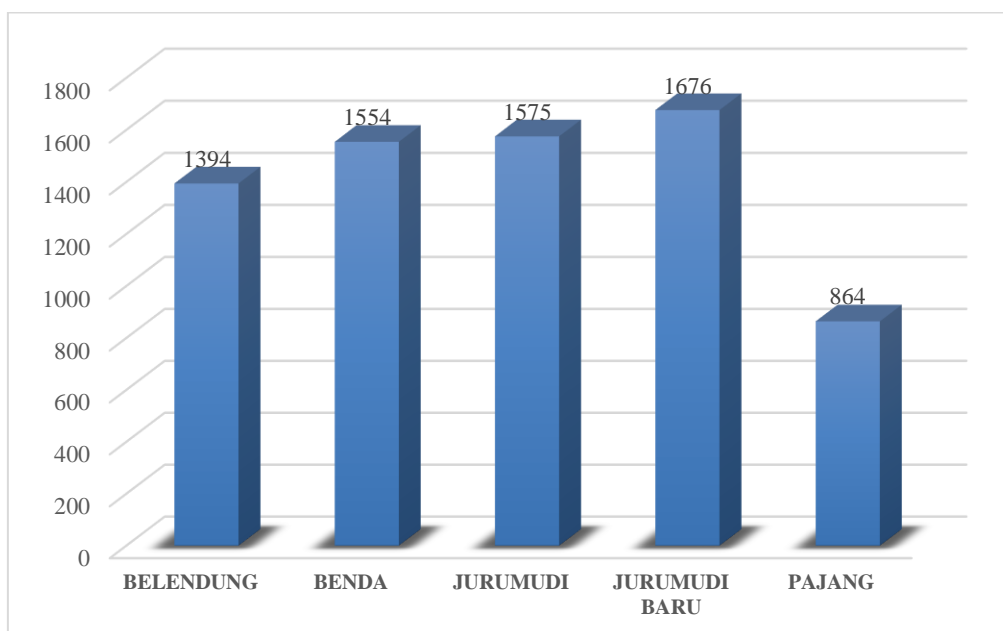
Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa total status kesejahteraan sosial di kecamatan batuceper yaitu 4.661 Jiwa, yang tersebar di 7 kelurahan yaitu Batuceper, Batujaya, Batusari, Kebon Besar, Poris Gaga, Poris Jaya, dan Poris Gaga Baru dengan total masing-masing 815 jiwa, 391 jiwa, 771 jiwa, 996 jiwa, 862 jiwa, 391 jiwa, dan 435 jiwa. Kelurahan yang memiliki Persentase tertinggi status kesejahteraan sosial yaitu kelurahan kebon besar 21,37% dan kelurahan yang memiliki nilai terendah yaitu poris jaya dan batujaya 8,39%.

4.2.2 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Benda

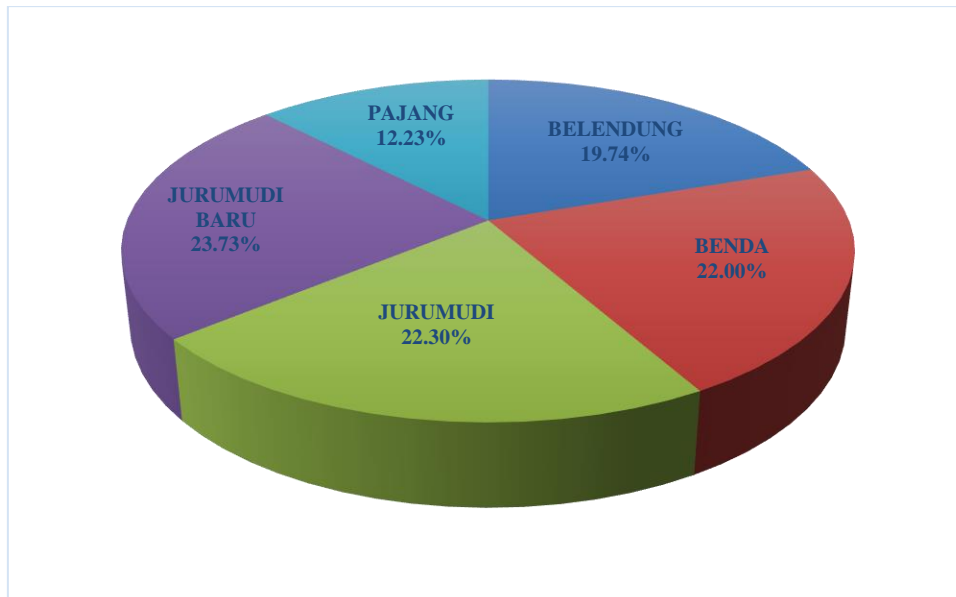
Tabel 4.7 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Benda

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
BELENDUNG	179	105	151	385	574
BENDA	282	72	193	484	523
JURUMUDI	173	124	249	465	564
JURUMUDI BARU	365	129	224	438	520
PAJANG	216	111	133	204	200
KEC BENDA	1.215	541	950	1.976	2.381

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.9 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Benda



Gambar 4.10 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Benda

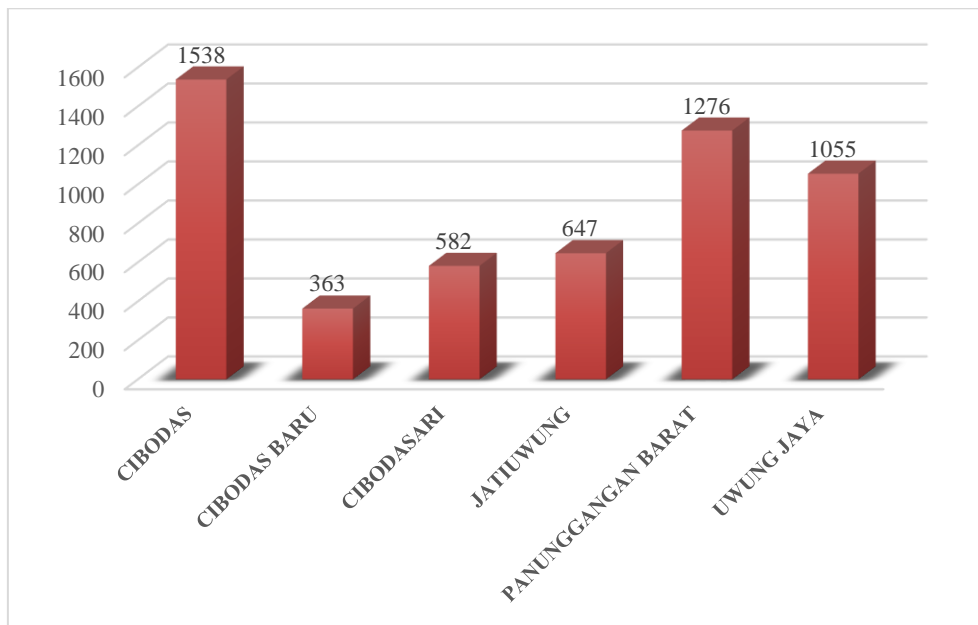
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Benda tersebar di lima kelurahan yaitu belendung, benda, jurumudi, jurumudi baru, dan pajang, dengan total masing-masing yaitu 1.394 jiwa, 1.554 jiwa, 1.575 jiwa, 1.676 jiwa, dan 864 jiwa. Dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan jurumudi baru sebesar 23,73% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Pajang sebesar 12,23%.

4.2.3 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Cibodas

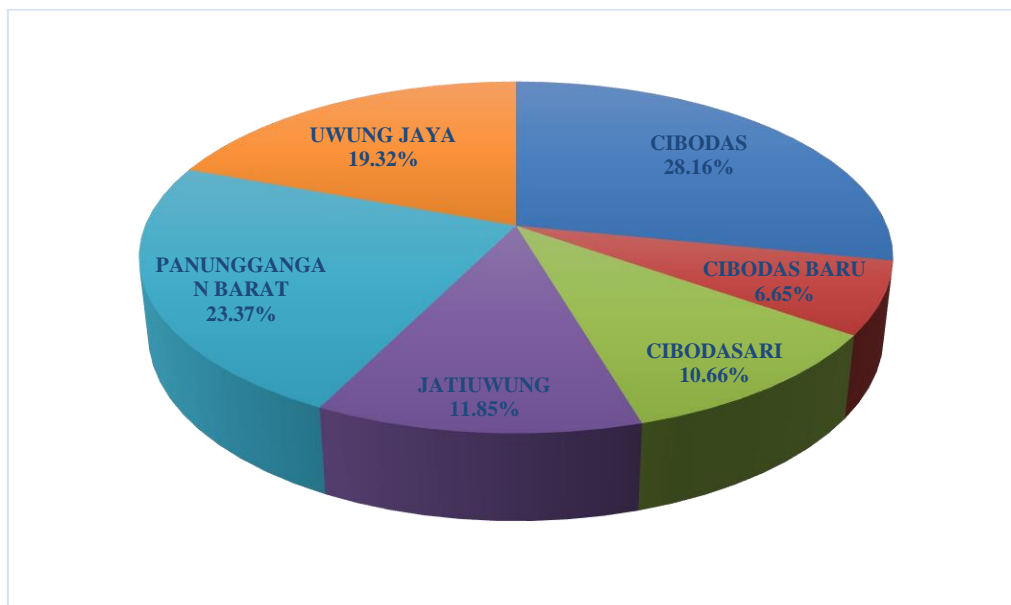
Tabel 4.8 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cibodas

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
CIBODAS	189	122	267	512	448
CIBODAS BARU	14	27	64	129	129
CIBODASARI	91	77	101	145	168
JATIUWUNG	93	53	111	181	209
PANUNGGANGAN BARAT	99	101	227	405	444
UWUNG JAYA	127	138	209	299	282
KEC CIBODAS	613	518	979	1.671	1.680

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.11 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cibodas



Gambar 4.12 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cibodas

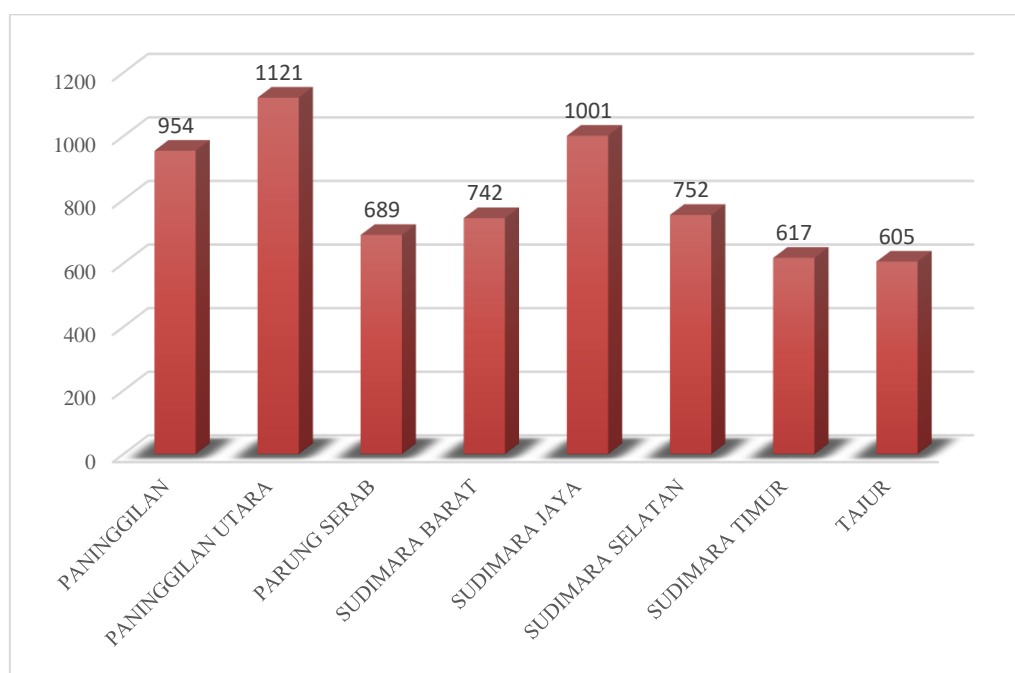
Total status kesejahteraan sosial di kecamatan cibodas terbagi di 6 kelurahan yaitu Cibodas 1.538 jiwa, Cibodas Baru 363 jiwa, Cibodasari 582 jiwa, Jatiuwung 647 jiwa, Panunggangan Barat 1.276 jiwa, dan Uwung Jaya 1.055 jiwa. Sedangkan Persentase tertinggi status kesejahteraan sosial yaitu sebesar 28,16% di kelurahan cibodas, dan Persentase terendah yaitu di kelurahan Cibodas Baru sebesar 6,65%.

4.2.4 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Ciledug

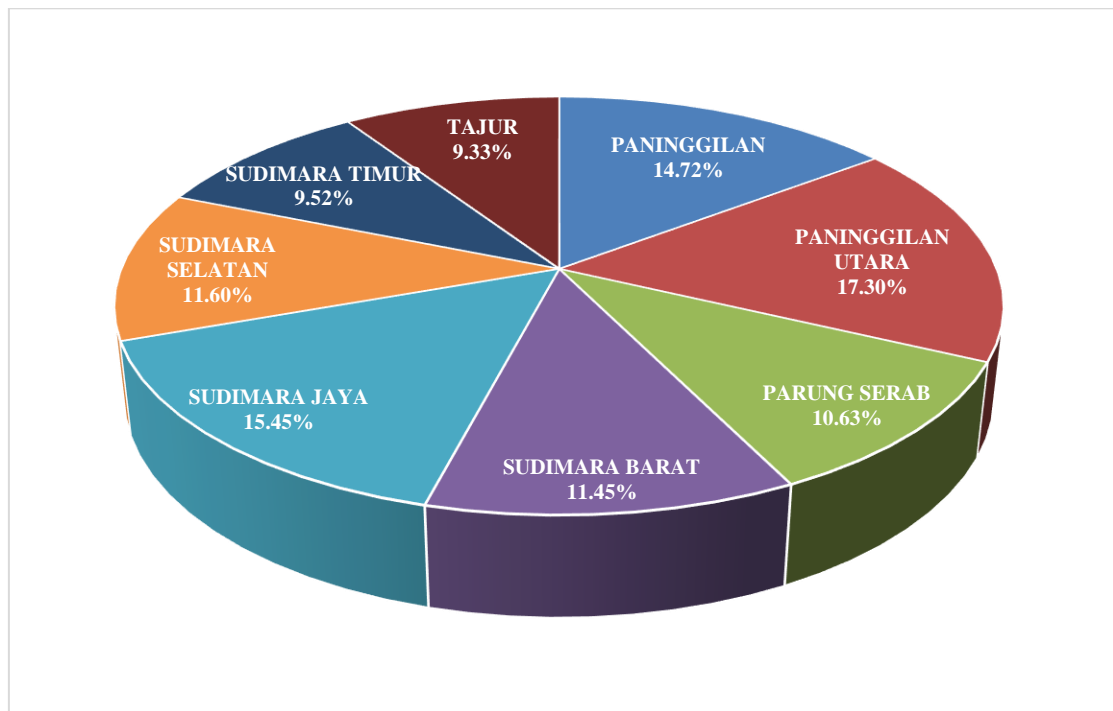
Tabel 4.9 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Ciledug

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
PANINGGILAN	67	106	179	283	319
PANINGGILAN UTARA	86	90	153	325	467
PARUNG SERAB	53	72	111	197	256
SUDIMARA BARAT	49	28	95	235	335
SUDIMARA JAYA	98	67	149	313	374
SUDIMARA SELATAN	69	90	135	227	231
SUDIMARA TIMUR	55	68	123	164	207
TAJUR	64	43	78	171	249
KEC CILEDUG	541	564	1.023	1.915	2.438

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.13 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Ciledug



Gambar 4.14 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Ciledug

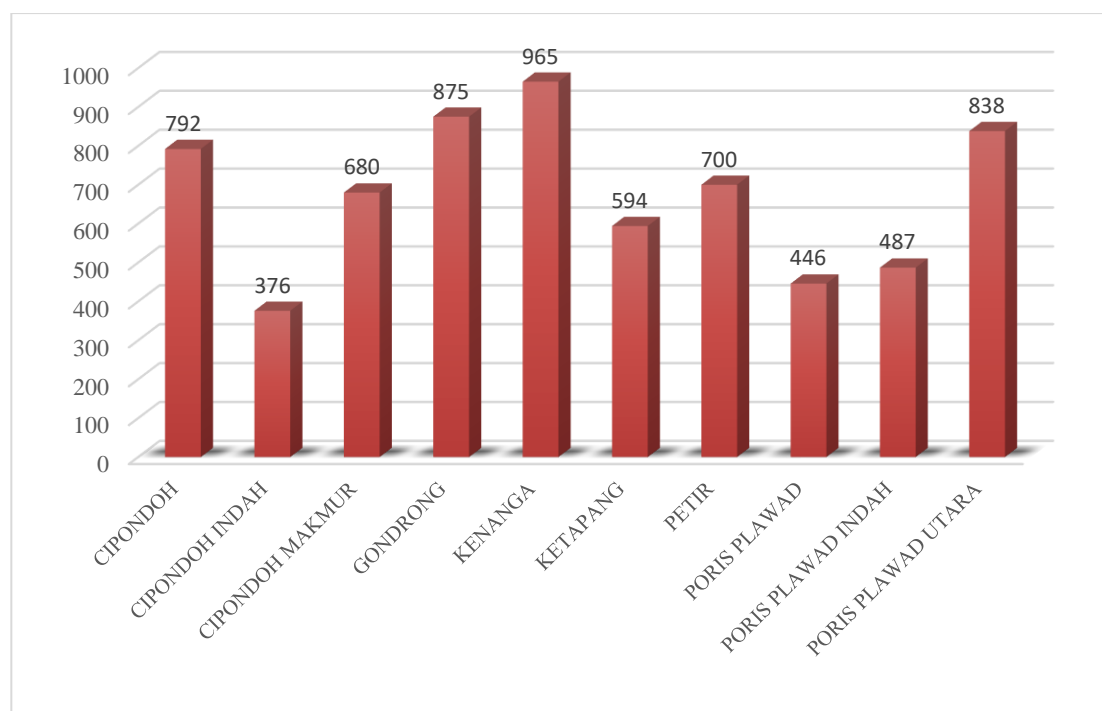
Total status kesejahteraan sosial di kecamatan ciledug terbagi di 8 kelurahan yaitu paninggilan 954 jiwa, paninggilan utara 1.121 jiwa, parung serab 689 jiwa, sudimara barat 742 jiwa, sudimara jaya 1001 jiwa, sudimara selatan 752 jiwa, sudimara timur 617 jiwa, dan tajur 605 jiwa. Sedangkan Persentase tertinggi pada status kesejahteraan sosial di kecamatan ciledug yaitu kelurahan paninggilan utara sebesar 14,72%, dan Persentase terendah yaitu di kelurahan Tajur sebesar 9,33%.

4.2.5 Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Cipondoh

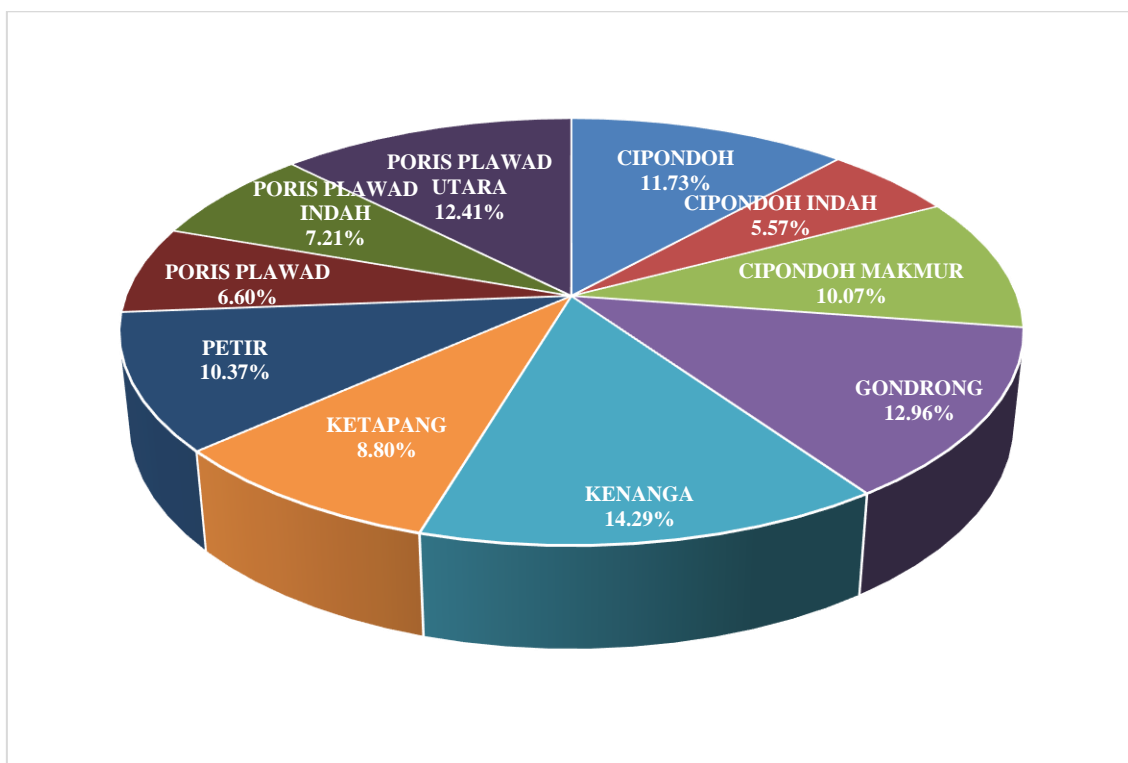
Tabel 4.10 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cipondoh

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAA N 5+
CIPONDOH	132	72	135	200	253
CIPONDOH INDAH	39	39	74	122	102
CIPONDOH MAKMUR	49	28	76	151	376
GONDRONG	76	123	165	260	251
KENANGA	186	104	140	272	263
KETAPANG	165	60	77	116	176
PETIR	69	47	110	179	295
PORIS PLAWAD	74	44	73	136	119
PORIS PLAWAD INDAH	87	53	67	111	169
PORIS PLAWAD UTARA	136	72	138	219	273
KEC CIPONDOH	877	570	917	1.547	2.004

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.15 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cipondoh



Gambar 4.16 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Cipondoh

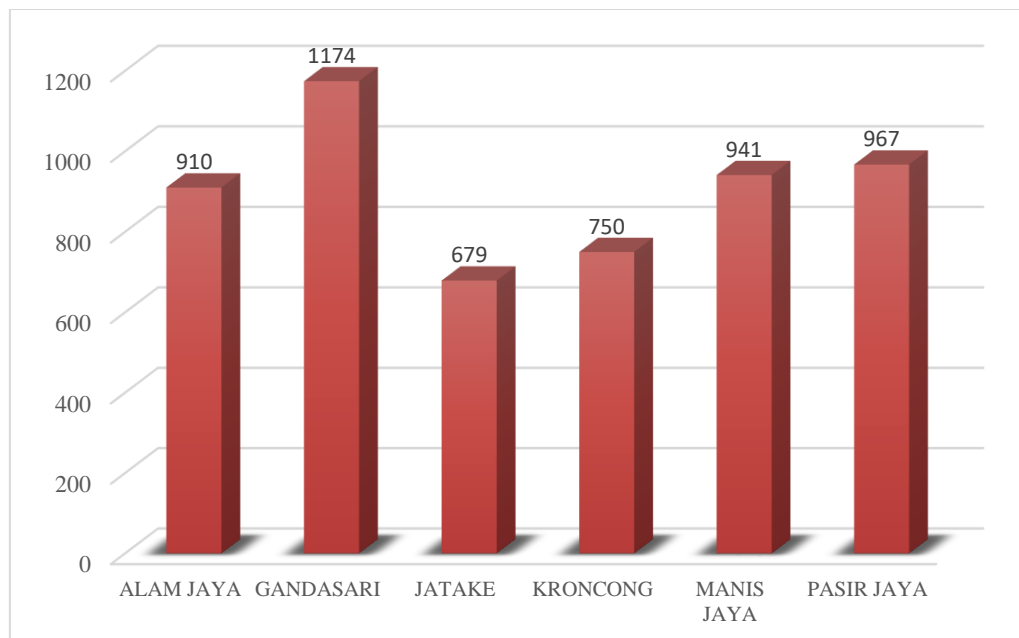
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Cipondoh tersebar di 10 kelurahan yaitu Cipondoh 792 jiwa, Cipondoh Indah 376 jiwa, Cipondoh Makmur 680 jiwa, Gondrong 875 jiwa, Kenanga 965 jiwa, Ketapang 594 jiwa, Petir 700 jiwa, Poris Plawad 446 jiwa, Poris Plawad Indah 487 jiwa, dan Poris Plawad Utara 838 jiwa. Dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Kenanga baru sebesar 14,29% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Cipondoh Indah sebesar 5,57%.

4.2.6 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung

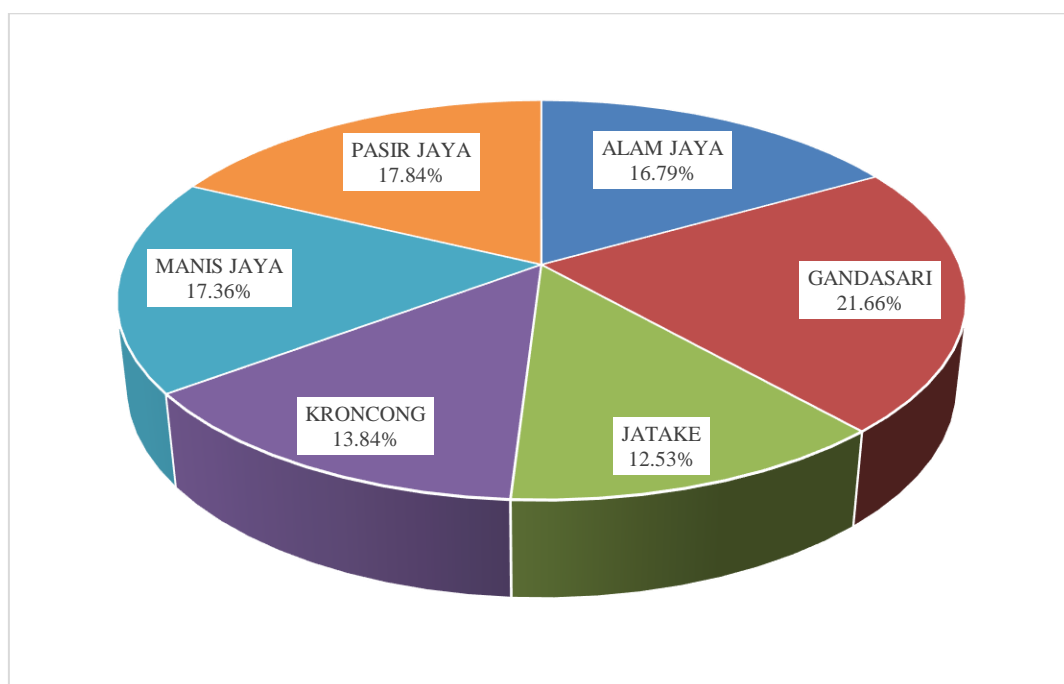
Tabel 4.11 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
ALAM JAYA	157	107	123	222	301
GANDASARI	87	52	128	288	619
JATAKE	145	57	84	177	216
KRONCONG	61	33	116	233	307
MANIS JAYA	145	88	167	274	267
PASIR JAYA	96	29	83	311	448
KEC JATI UWUNG	691	366	701	1.505	2.158

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.17 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung



Gambar 4.18 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Jatiuwung

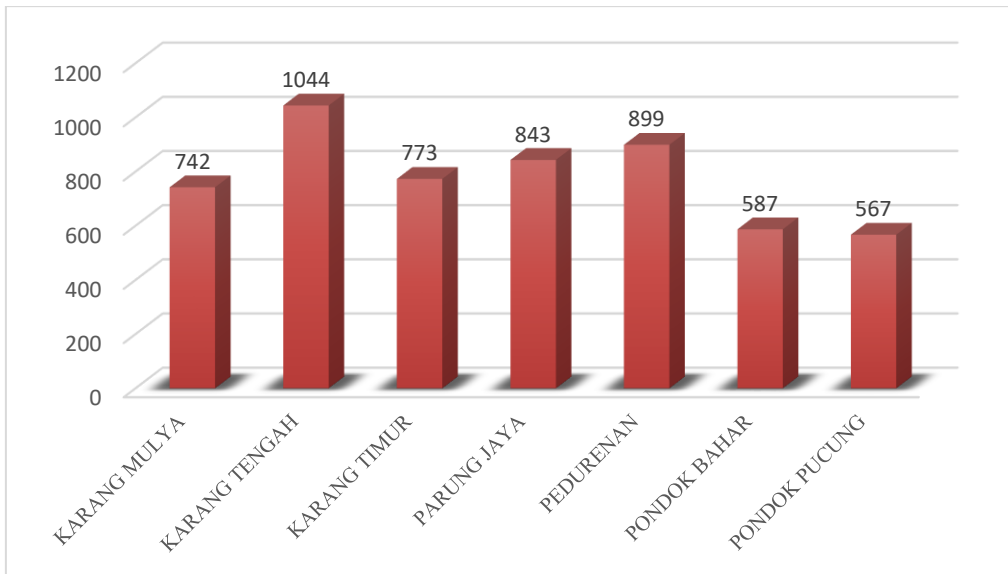
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Jatiuwung tersebar di 6 kelurahan yaitu Alam Jaya 910 jiwa, Gandasari 1.174 jiwa, Jatake 679 jiwa, Keroncong 750 jiwa, Manis Jaya 941 jiwa, dan Pasir Jaya 967 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Gandasari sebesar 21,66% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Jatake sebesar 12,53%.

4.2.7 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah

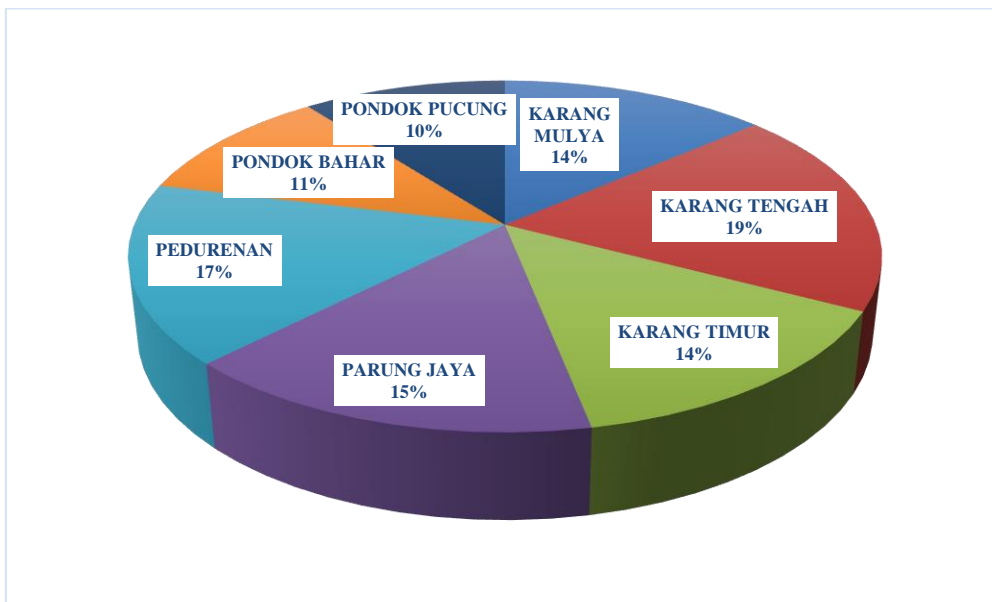
Tabel 4.12 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
KARANG MULYA	135	73	110	175	249
KARANG TENGAH	213	113	170	250	298
KARANG TIMUR	123	107	128	181	234
PARUNG JAYA	200	116	73	212	242
PEDURENAN	133	123	125	250	268
PONDOK BAHAR	26	40	96	186	239
PONDOK PUCUNG	120	71	97	153	126
KEC KARANG TENGAH	950	643	799	1.407	1.656

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.19 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah



Gambar 4.20 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karang Tengah

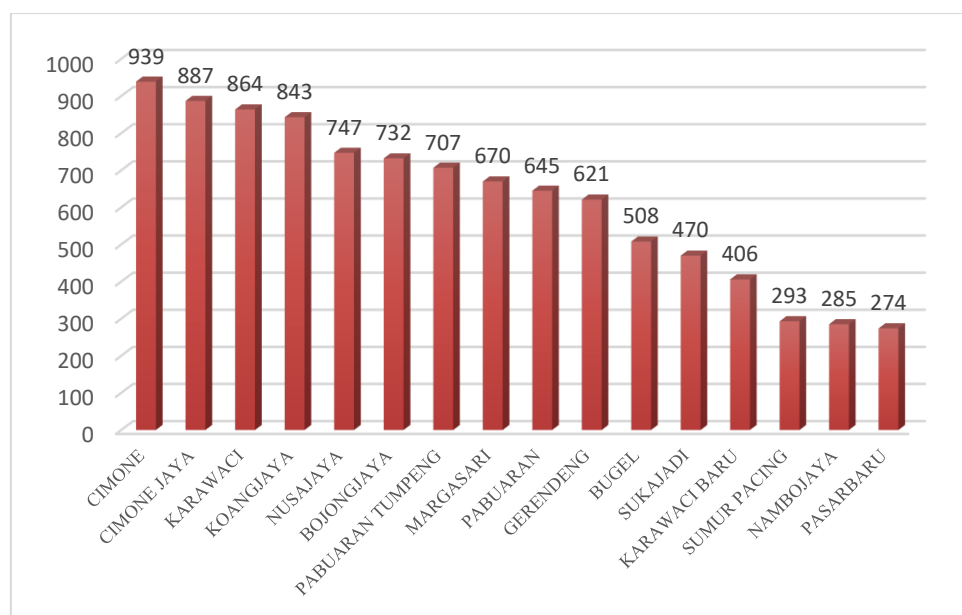
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Karang Tengah tersebar di 7 kelurahan yaitu Karang Mulya 742 jiwa, Karang Tengah 1.044 jiwa, Karang Timur 733 jiwa, Parung Jaya 843 jiwa, Pedurenan 899 jiwa, Pondok Bahar 587 jiwa, dan Pondok Pucung 567 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Karang Tengah sebesar 19% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Pondok Pucung sebesar 10%.

4.2.8 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Karawaci

Tabel 4.13 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karawaci

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
BOJONGJAYA	93	44	90	243	262
BUGEL	88	71	98	130	121
CIMONE	155	102	151	255	276
CIMONE JAYA	113	121	161	250	242
GERENDENG	93	64	114	158	192
KARAWACI	298	104	137	182	143
KARAWACI BARU	84	43	64	91	124
KOANGJAYA	128	55	102	292	266
MARGASARI	89	85	129	165	202
NAMBOJAYA	25	39	52	79	90
NUSAJAYA	144	78	103	248	174
PABUARAN	129	106	119	151	140
PABUARAN TUMPENG	79	80	92	199	257
PASARBARU	55	18	43	64	94
SUKAJADI	157	66	63	92	92
SUMUR PACING	69	29	46	74	75
KEC KARAWACI	1.799	1.105	1.564	2.673	2.750

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.21 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Karawaci

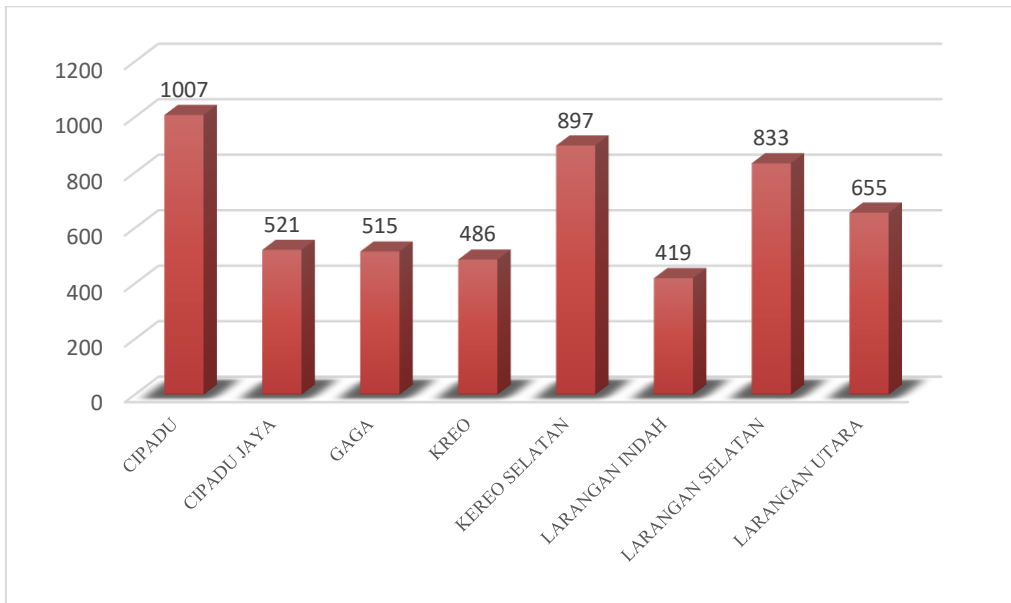
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Karawaci tersebar di 16 kelurahan dengan urutan dari yang terbesar ke terkecil yaitu Cimone 939 jiwa, Cimone Jaya 887 jiwa, Karawaci 864 jiwa, Koang Jaya 843 jiwa, Nusa Jaya 747 jiwa, Bojong Jaya 732 jiwa, Pabuaran Tumpeng 707 jiwa, Margasari 670 jiwa, Pabuaran 645 jiwa, Gerendeng 621 jiwa, Bugel 508 jiwa, Sukajadi 470 jiwa, Karawaci Baru 406 jiwa, Sumur Pacing 293 jiwa, Nambo Jaya 285 jiwa, dan Pasar Baru 274 jiwa.

4.2.9 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Larangan

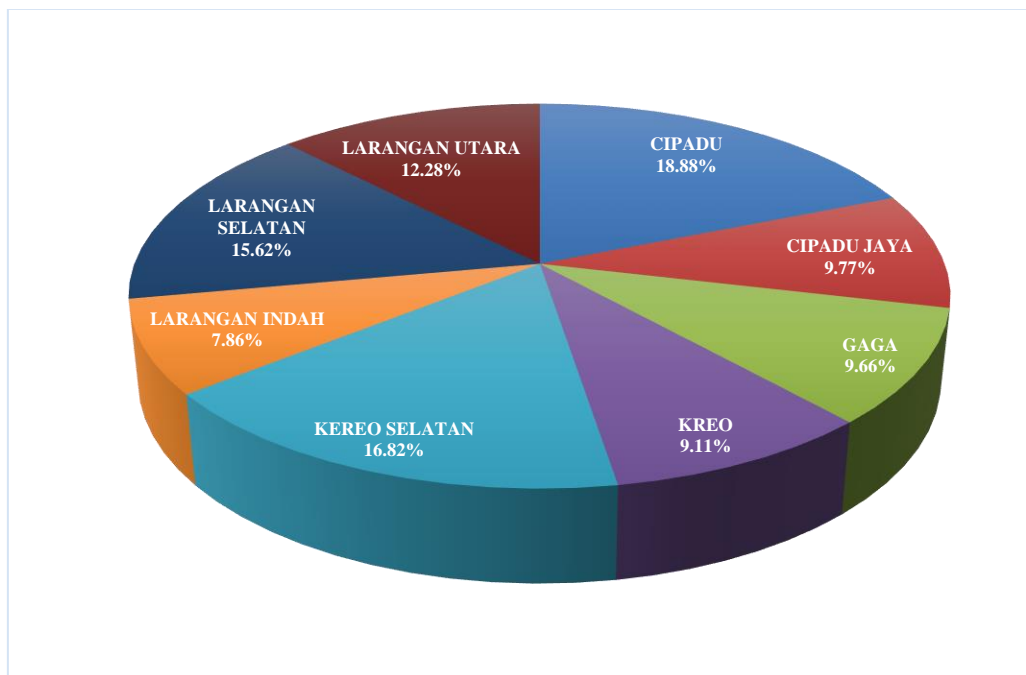
Tabel 4.14 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Larangan

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
CIPADU	112	119	165	268	343
CIPADU JAYA	81	62	103	141	134
GAGA	56	64	95	154	146
KEREO	101	50	76	92	167
KEREO SELATAN	172	146	162	211	206
LARANGAN INDAH	104	43	66	91	115
LARANGAN SELATAN	101	86	136	196	314
LARANGAN UTARA	56	53	108	173	265
KEC LARANGAN	783	623	911	1.326	1.690

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.22 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Larangan



Gambar 4.23 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Larangan

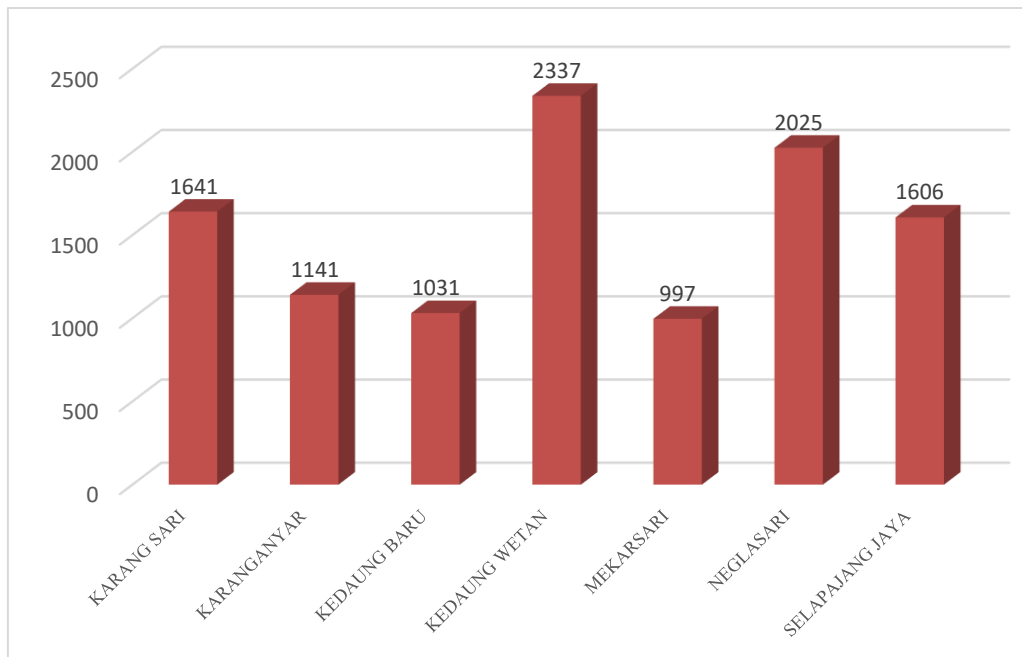
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Larangan tersebar di 8 kelurahan yaitu Cipadu 1007 jiwa, Cipadu Jaya 521 jiwa, Gaga 515 jiwa, Kreo 486 jiwa, Kreo Selatan 897 jiwa, Larangan Indah 419 jiwa, Larangan Selatan 833 jiwa, dan Larangan Utara 655 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Cipadu sebesar 18,88% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Larangan Indah sebesar 7,86%.

4.2.10 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Neglasari

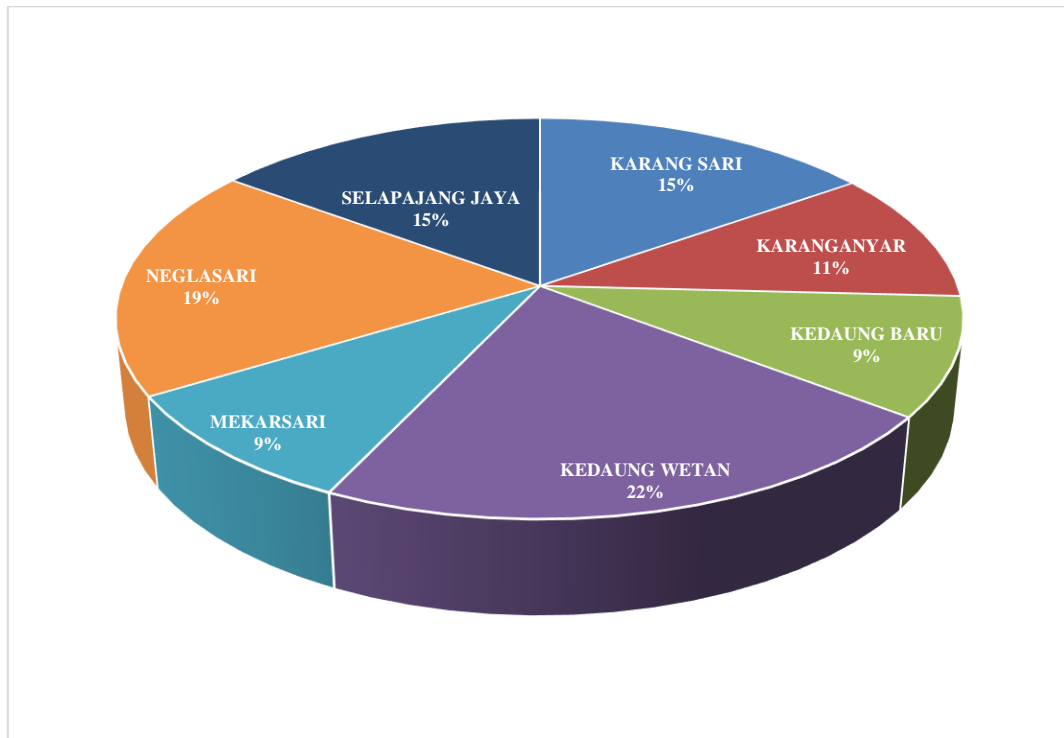
Tabel 4.15 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Neglasari

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
KARANG SARI	266	139	215	451	570
KARANGANYAR	135	77	150	366	413
KEDAUNG BARU KEDAUNG WETAN	148	57	110	333	383
MEKARSARI	507	232	313	634	651
NEGLASARI	195	140	180	285	197
SELAPAJANG JAYA	299	186	347	621	572
KEC NEGLASARI	1.755	967	1.569	3.176	3.311

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.24 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Neglasari



Gambar 4.25 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Neglasari

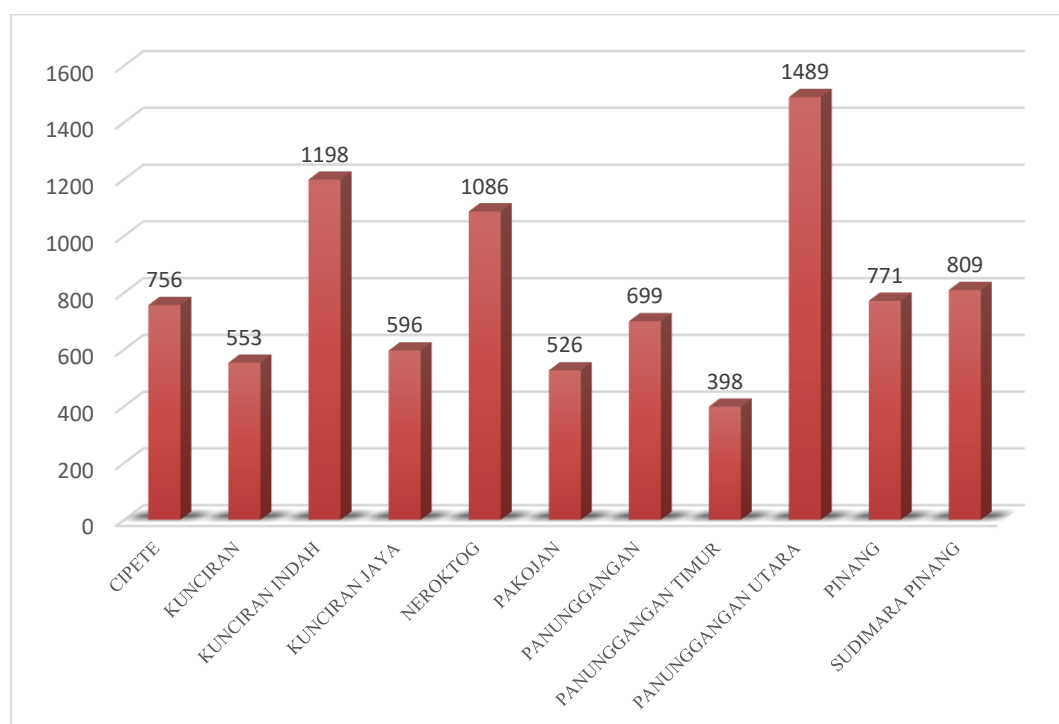
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Neglasari tersebar di 7 kelurahan yaitu Karangsari 1.641 jiwa, Karang Anyar 1.141 jiwa, Kedaung Baru 1.031 jiwa, Kedaung Wetan 2.337 jiwa, Mekarsari 997 jiwa, Neglasari 2025 jiwa, Selapang Jaya 1.606 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Kedaung Wetan sebesar 22% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Mekarsari sebesar 9%.

4.2.11 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Pinang

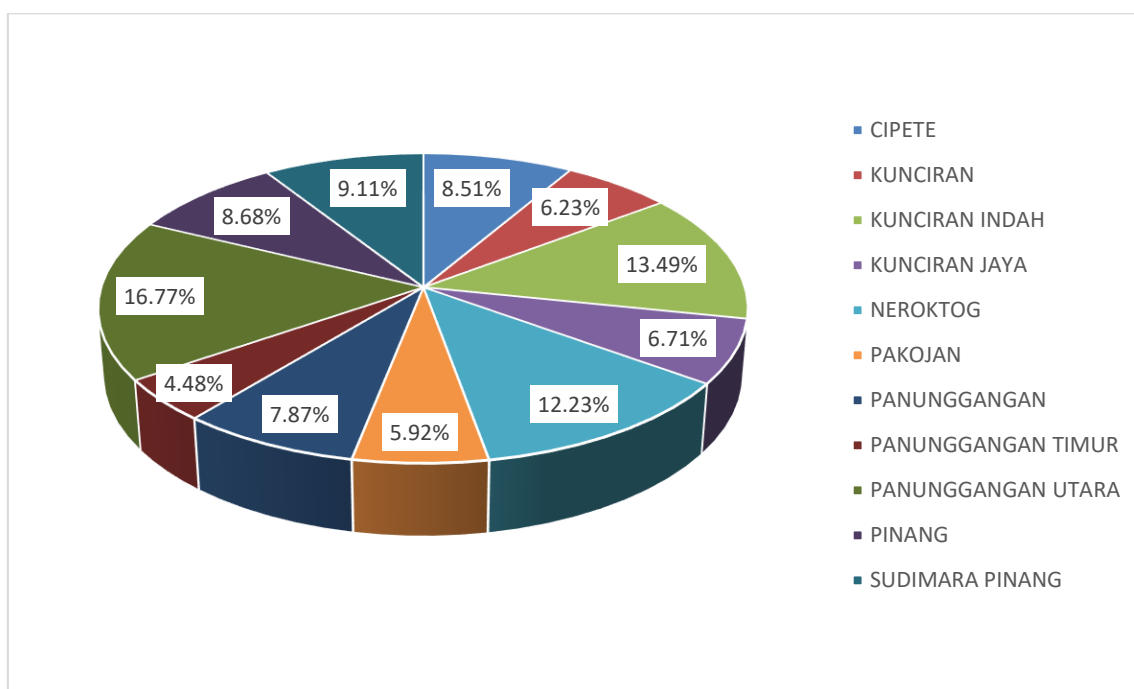
Tabel 4.16 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Pinang

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
CIPETE	79	66	103	266	242
KUNCIRAN	44	18	55	138	298
KUNCIRAN INDAH	105	135	226	312	420
KUNCIRAN JAYA	108	64	110	165	149
NEROKTOG	165	126	166	310	319
PAKOJAN	75	29	72	165	185
PANUNGGANGAN	76	62	112	203	246
PANUNGGANGAN TIMUR	92	31	70	103	102
PANUNGGANGAN UTARA	117	98	192	519	563
PINANG	69	76	136	235	255
SUDIMARA PINANG	58	111	166	230	244
KEC PINANG	988	816	1.408	2.646	3.023

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.26 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Pinang



Gambar 4.27 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Pinang

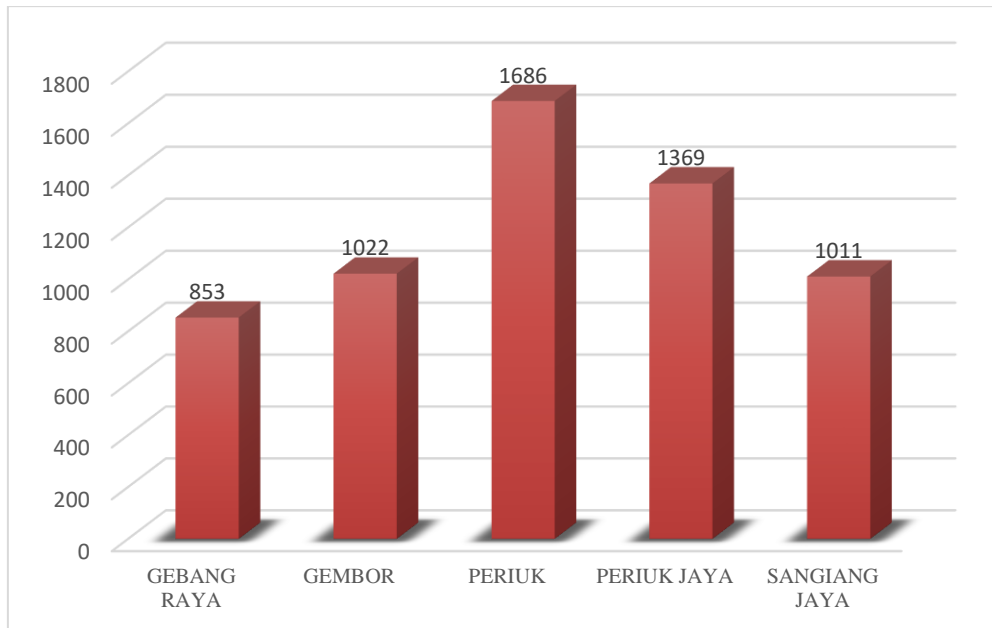
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Pinang tersebar di 11 kelurahan yaitu Cipete 756 jiwa, Kunciran 553 jiwa, Kunciran Indah 1.198 jiwa, Nerogtog 1.086 jiwa, Pakojan 526 jiwa, Panunggangan 699 jiwa, Panunggangan Timur 398, Panunggangan Utara 1.489 jiwa, Pinang 771 jiwa, dan Sudimara Pinang 809 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Panunggangan Utara sebesar 16,77% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Panunggangan Timur sebesar 4,48%.

4.2.12 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Periuk

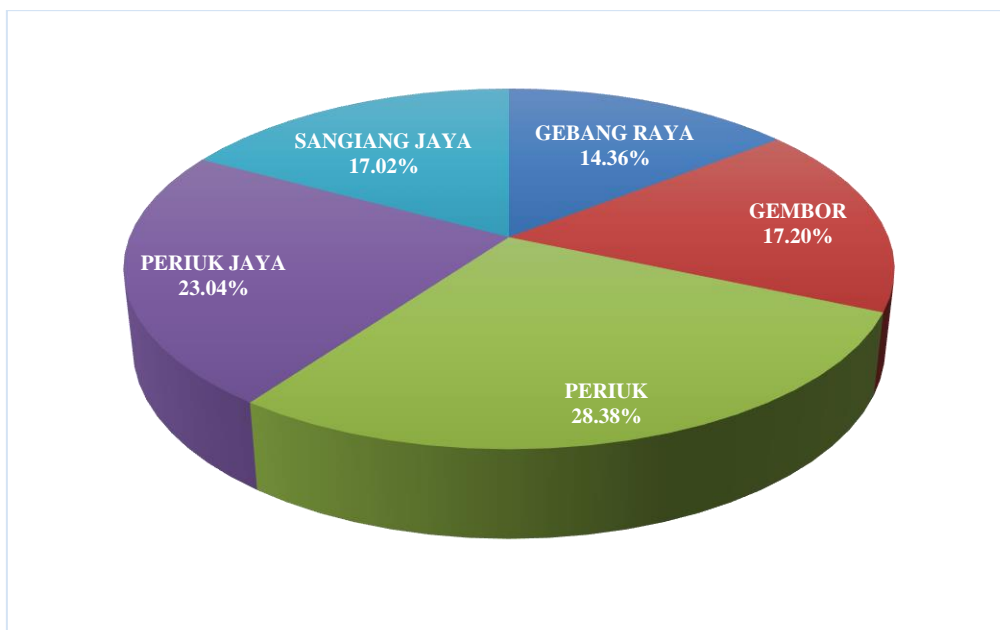
Tabel 4.17 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Periuk

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
GEBANG RAYA	125	63	123	252	290
GEMBOR	47	43	99	351	482
PERIUK	199	107	234	658	488
PERIUK JAYA	127	74	167	458	543
SANGIANG JAYA	139	126	180	283	283
KEC PERIUK	637	413	803	2.002	2.086

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.28 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan Kecamatan Periuk



Gambar 4.29 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Periuk

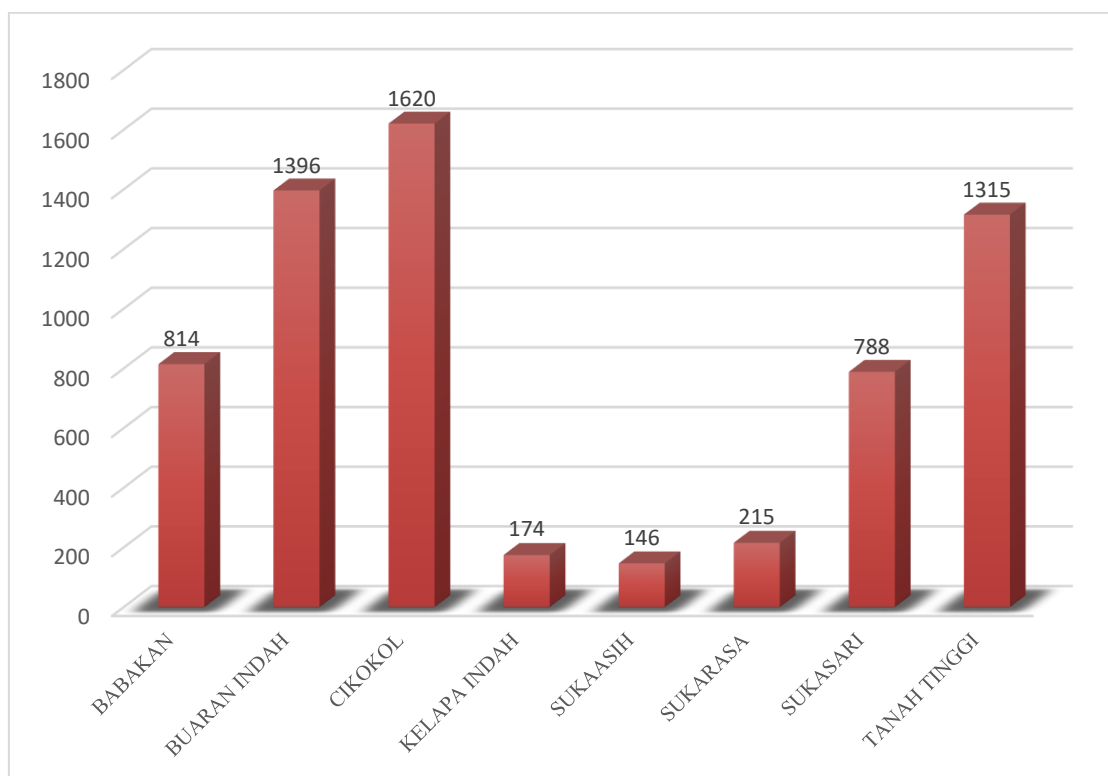
Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Periuk tersebar di 5 kelurahan yaitu Gebang Raya 853 jiwa, Gembor 1.022 jiwa, Periuk 1.686 jiwa, Periuk Jaya 1.369 jiwa, dan Sangiang Jaya 1.011 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Periuk sebesar 28,38% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Gebang Raya sebesar 14,36%.

4.2.13 Status Kesejahteraan Sosial Per-Kelurahan di Kecamatan Tangerang

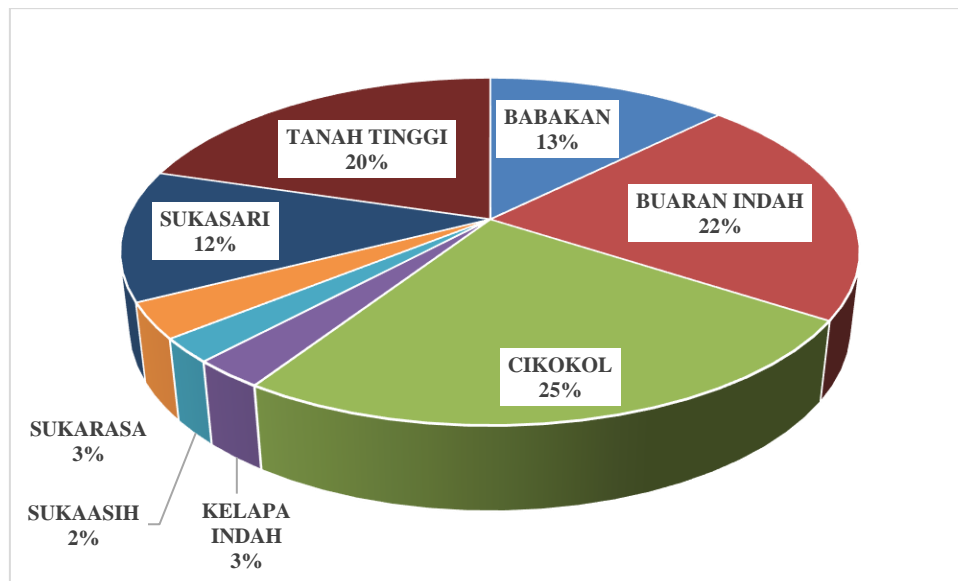
Tabel 4.18 Jumlah Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Tangerang

BERDASARKAN RUMAH TANGGA (RT)					
KELURAHAN	KESEJAHTERAAN 1	KESEJAHTERAAN 2	KESEJAHTERAAN 3	KESEJAHTERAAN 4	KESEJAHTERAAN 5+
BABAKAN	97	47	95	295	280
BUARAN INDAH	195	147	266	385	403
CIKOKOL	238	195	302	503	382
KELAPA INDAH	46	19	19	40	50
SUKAASIH	21	19	24	36	46
SUKARASA	49	23	33	49	61
SUKASARI	93	77	109	312	197
TANAH TINGGI	258	150	225	328	354
KEC TANGERANG	997	677	1.073	1.948	1.773

Sumber: Kemensos No.146/HUK/2020



Gambar 4.30 Grafik Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan Kecamatan Tangerang



Gambar 4.31 Persentase Status Kesejahteraan Sosial per Kelurahan di Kecamatan Tangerang

Status kesejahteraan sosial di Kecamatan Tangerang tersebar di 8 kelurahan yaitu Babakan 814 jiwa, Buaran Indah 1.396 jiwa, Cikokol 1.620 jiwa, Kelapa Indah 174 jiwa, Sukaasih 146 jiwa, Sukarasa 215 jiwa, Sukasari 788 jiwa, Tanah Tinggi 1.315 jiwa, dimana Persentase terbesar yaitu di kelurahan Cikokol sebesar 25% dan Persentase terkecil yaitu di kelurahan Sukaasih sebesar 2%.

4.3 Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

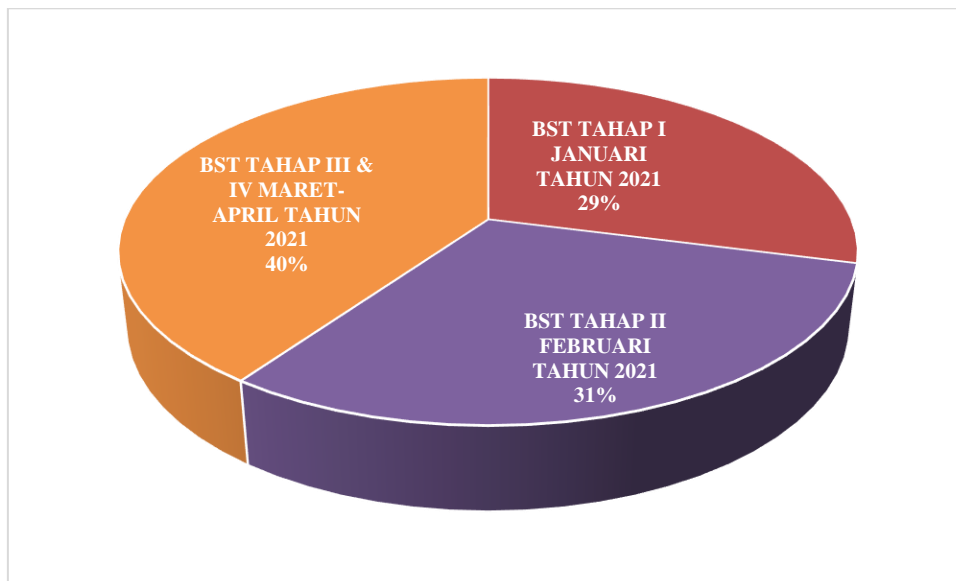
Tabel 4.19 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai per Kecamatan Januari – April 2021

KECAMATAN	BST TAHAP I	BST TAHAP II	BST TAHAP III & IV
	JANUARI TAHUN	FEBRUARI TAHUN	MARET-APRIL
	2021	2021	TAHUN 2021
Batu Ceper	7.426	7.905	10.710
Benda	8.960	9.705	12.438
Cibodas	12.469	13.547	16.352
Ciledug	8.297	8.881	13.835
Cipondoh	11.462	12.677	15.790
Jatiuwung	7.042	7.643	9.657
Karang Tengah	7.179	7.735	11.222
Karawaci	13.741	14.103	18.602
Larangan	7.943	8.583	13.836
Neglasari	10.657	11.209	14.107
Periuk	9.658	10.152	12.700
Pinang	15.740	15.669	20.684
Tangerang	13.956	14.795	16.484
TOTAL	134.530	142.604	186.387

SUMBER: Realisasi Kantor Pos

Note: Untuk BST TAHAP III&IV Bulan Maret-April Update pertanggal 02 Juni 2021

Dari tabel 4.19 dapat diketahui bahwa di Kota Tangerang dari periode Januari hingga April 2021 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dilaksanakan terdiri dari 4 tahap. Bantuan Sosial Tunai tahap 1 dilaksanakan pada bulan Januari 2021, dimana kecamatan tertinggi pada tahap 1 sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai yaitu kecamatan Pinang sebanyak 15.740 Jiwa, Sedangkan kecamatan terendah yaitu di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 7.042 Jiwa. Kemudian Bantuan Sosial Tunai tahap 2 dilaksanan pada bulan Februari 2021 dengan kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan sosial tunai yaitu kecamatan Pinang sebanyak 15.669 Jiwa, dan kecamatan terendah yaitu Jatiuwung sebanyak 7.643 Jiwa. Bantuan Sosial Tunai tahap 3 dan 4 dilaksanakan di bulan Maret hingga April 2021, pada tahap ini kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan sosial tunai yaitu kecamatan Pinang sebanyak 20.684 Jiwa, dan kecamatan terendah yaitu Jatiuwung sebanyak 9.657 Jiwa.



Gambar 4.32 Persentase Penerima Bantuan Sosial Tunai Tahap I hingga Tahap IV

Dari gambar 4.32 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi pada tahap bantuan sosial tunai tahun 2021 di Kota Tangerang yaitu terdapat pada Tahap III dan IV yaitu sebesar 40%, Sedangkan presentase terendah yaitu pada tahap I sebesar 29%.

4.4 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

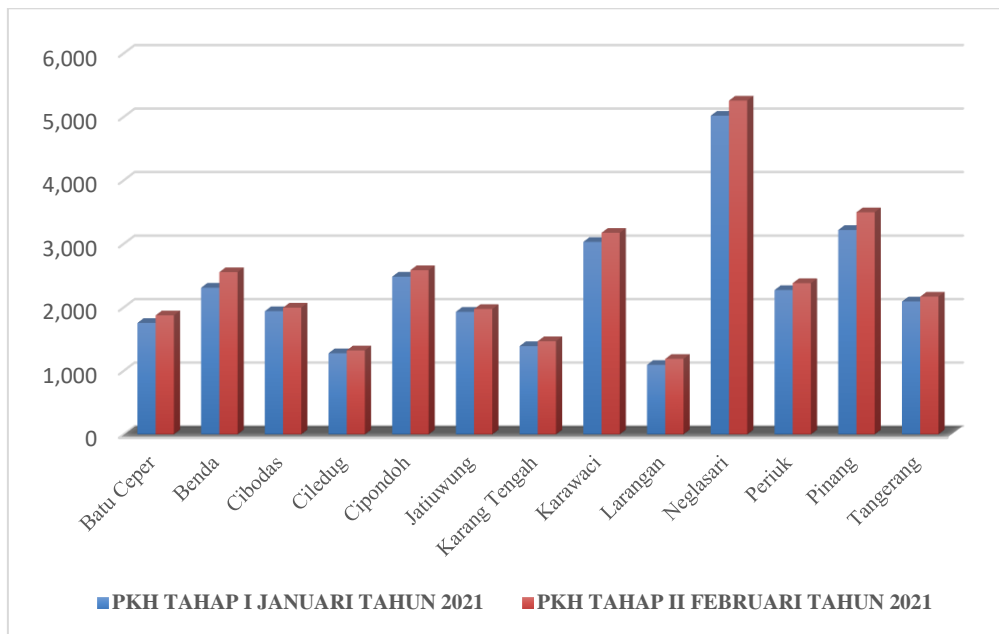
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar

mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Tabel 4.20 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan per Kecamatan Tahun 2021

KECAMATAN	PKH TAHAP I JANUARI	PKH TAHAP II
	TAHUN 2021	FEBRUARI TAHUN 2021
Batu Ceper	1.754	1.874
Benda	2.309	2.554
Cibodas	1.939	1.995
Ciledug	1.276	1.321
Cipondoh	2.483	2.585
Jatiuwung	1.929	1.973
Karang Tengah	1.389	1.466
Karawaci	3.030	3.173
Larangan	1.093	1.187
Neglasari	5.017	5.255
Periuk	2.272	2.381
Pinang	3.218	3.497
Tangerang	2.092	2.168
TOTAL	29.801	31.429

SUMBER: Kementerian Sosial



Gambar 4.33 Grafik Penerima PKH per Kecamatan Periode Januari-Februari Tahun 2021

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa penerima keluarga harapan (PKH) di Kota Tangerang tahun 2021 terdiri dari 2 tahap. PKH tahap 1 dilaksanakan di bulan Januari, dengan total keseluruhan sebanyak 29.801 Jiwa, sedangkan kecamatan tertinggi sebagai penerima keluarga harapan yaitu kecamatan Neglasari sebanyak 5.017 Jiwa, dan kecamatan terendah penerima keluarga harapan yaitu kecamatan Ciledug sebanyak 1.276 Jiwa. Kemudian PKH tahap 2 dilaksanakan di bulan Februari sejumlah 31.429 Jiwa, dan kecamatan tertinggi sebagai penerima keluarga harapan yaitu Neglasari sebanyak 5.255 Jiwa, sedangkan kecamatan terendah penerima keluarga harapan yaitu kecamatan Larangan sebanyak 1.187 Jiwa.

4.5 Bantuan Pangan Non-Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu

pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

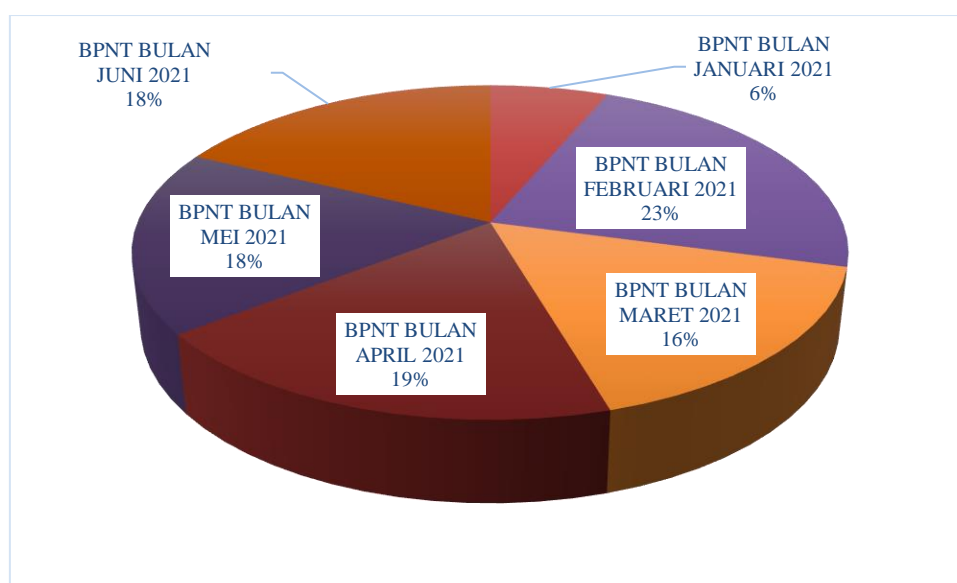
Tabel 4.21 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai per Kecamatan Periode Januari – Juni 2021

KECAMATAN	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT
	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN	BULAN
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Batu Ceper	937	2.377	1.750	1.969	1.850	1.850
Benda	384	2.887	1.977	2.229	2.083	2.083
Cibodas	1.361	2.863	2.167	2.370	2.310	2.310
Ciledug	1.103	2.377	1.642	1.928	1.772	1.772
Cipondoh	1.071	3.033	2.212	2.550	2.408	2.408
Jatiuwung	957	2.607	1.927	2.165	2.051	2.051
Karang Tengah	622	1.945	1.257	1.577	1.443	1.443
Karawaci	827	4.684	3.057	3.965	3.781	3.781
Larangan	765	1.629	1.145	1.364	1.235	1.235
Neglasari	820	6.018	4.447	4.995	4.694	4.694
Periuk	656	2.731	1.955	2.245	2.132	2.132
Pinang	1.275	4.002	2.936	3.390	3.061	3.061
Tangerang	391	3.063	2.054	2.606	2.452	2.452
TOTAL	11.169	40.216	28.526	33.353	31.272	31.272

SUMBER: BANK BNI

Noted: Untuk BPNT DATA BERDASARKAN DARI SP2D BANK BNI

Dari tabel 4.21 dapat diketahui total keseluruhan bantuan pangan non-tunai di Kota Tangerang dari bulan Januari hingga Juni 2021 yaitu sebanyak 175.808 Jiwa. Sedangkan dari periode Januari hingga Juni tahun 2021 kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan pangan non tunai yaitu di kecamatan Neglasari sebanyak 25.668 Jiwa, dan kecamatan terendah sebagai penerima bantuan pangan non tunai yaitu kecamatan Larangan sejumlah 7.373 Jiwa.



Gambar 4.34 Persentase Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Periode Januari-Juni 2021

Persentase tertinggi bantuan pangan non tunai di Kota Tangerang yaitu pada bulan Februari 2021 sebesar 23%, sedangkan persentase terendah bantuan pangan non tunai yaitu pada bulan Januari sebesar 6%.

4.6 Penerima Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai Beras

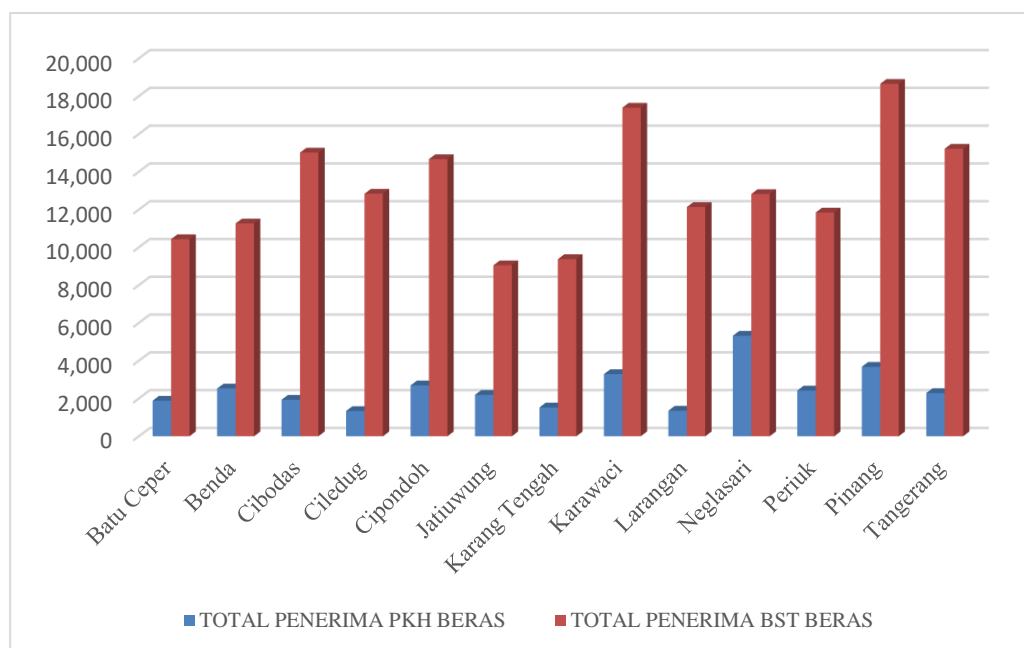
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun dalam hal ini bantuan yang diberikan berupa beras selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM), dengan total penerima keluarga harapan beras sebanyak 32.468 Jiwa, dan penerima bantuan sosial tunai beras sebanyak 170.703 Jiwa.

Tabel 4.22 Penerima PKH dan BST Beras selama PPKM per Kecamatan Tahun 2021

KECAMATAN	TOTAL PENERIMA	TOTAL PENERIMA BST
	PKH BERAS	BERAS
Batu Ceper	1.886	10.431
Benda	2.528	11.263
Cibodas	1.935	15.017
Ciledug	1.340	12.838
Cipondoh	2.693	14.666
Jatiuwung	2.194	9.053
Karang Tengah	1.527	9.378
Karawaci	3.291	17.389
Larangan	1.357	12.132
Neglasari	5.325	12.823
Periuk	2.424	11.842
Pinang	3.681	18.653
Tangerang	2.287	15.218
TOTAL	32.468	170.703

SUMBER: Kementerian Sosial



Gambar 4.35 Grafik Penerima PKH dan BST Beras selama PPKM per Kecamatan Tahun 2021

. Kecamatan tertinggi sebagai penerima PKH beras yaitu kecamatan Pinang sebanyak 3.681 Jiwa dan kecamatan terendah yaitu di kecamatan Ciledug sejumlah 1.340 Jiwa. Kemudian kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan sosial tunai berupa beras yaitu di kecamatan Pinang sebanyak 18.653 Jiwa, dan kecamatan terendah di Jatiuwung sebanyak 9.053 Jiwa.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penduduk dengan pengeluaran perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin, secara fisik sering ditandai dengan menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk dan berpendidikan rendah. Ciri orang miskin lainnya adalah biasanya bekerja dengan memperoleh penghasilan yang minim, bekerja di sektor informal maupun buruh serabutan, dengan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan bervariasi selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, baik secara persentase maupun secara jumlah. Secara persentase, kenaikan tersebut berturut-turut besarnya adalah 7,98 persen, 9,01 persen, 2,64 persen, 9,48 persen, 4,94 persen dan 8,30 persen. Sedangkan secara jumlah, besarnya kenaikan tersebut secara berturut-turut adalah 0,22 persen, 0,70 persen, 2,95 persen, 0,43 persen, 0,76 persen, akibat dari dampak pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berimbas negative terhadap kenaikan Garis Kemiskinan di Kota Tangerang.

Sedangkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 103,488, tahun 2019 sebesar 98,37, tahun 2020 sebesar 118,22 dan memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 4,76 persen, tahun 2019 sebesar 4,43 dan tahun 2020 sebesar 5,22. Menunjukkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dimana selalu terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2018 s/d 2020 berfluktuasi baik jumlah maupun persentasenya, naik dan turunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang ini sebagai peringatan bahwa Pemerintah harus semakin serius dan fokus dalam pengentasan kemiskinan.

Mengukur kemiskinan tidak cukup hanya melihat penambahan dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Karenanya dalam upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 0,84 kemudian mengalami penurunan sebesar 0,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,74, dikarenakan Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga membuat ketimpangan sedikit meningkat dari tahun lalu. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 0,84 kemudian mengalami penurunan sebesar 0,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,74, dikarenakan Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga membuat ketimpangan sedikit meningkat dari tahun lalu. Sedangkan indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada Tabel 3.6 terlihat bahwa nilai indeks, pada tahun 2018 pengeluaran diantara penduduk miskin bernilai indeks 0,17 meningkat pada tahun 2019 sebesar 0,24 dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,15 menggambarkan penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin semakin merata. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin begitu pula sebaliknya.

Ada berbagai tolak ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain *Kurva Conrad Lorenz*, *Corrado Gini Coefficient*, *Kuznets Index*, *Oshima Index* dan *Theil Decomposition Index*. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah *Gini Coefficient* atau lebih dikenal dengan nama *Gini Ratio* (GR). Angka *Gini Ratio* menurut H. T. Oshima:

4. ketimpangan rendah (*low*) bila GR kurang dari 0,3;
5. ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4
6. Ketimpangan tinggi (*high*) bila GR lebih dari 0,4.

Angka *Gini Ratio* menurut Michael P. Todaro:

4. Distribusi pendapatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai 0,35
5. Relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5
6. Timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7

Pada tahun 2020 *Gini Rasio* (GR) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berada pada ketimpangan tertinggi Kota Cilegon sebesar 0,373, urutan kedua Kota Tangerang Selatan sebesar 0,368, urutan ke tiga Kota Serang sebesar 0,352, urutan keempat Kota Tangerang sebesar 0,352 dilanjutkan urutan ke 5 Kab Lebak sebesar 0,314, urutan ke enam Kab Pandeglang sebesar 0,31, ke tujuh Kab Serang sebesar 0,303 dan terendah Kab Tangerang sebesar 0,285. Sementara khusus Kota Tangerang mengalami kenaikan *Gini Rasio* (GR) yang sebelumnya sebesar 0,328 pada tahun 2019 menjadi 0,339 pada tahun. Menurut Michael P. Todaro bila GR antara 0,2 sampai 0,35 ketimpangannya masih dalam kategori rendah, Sedangkan Menurut H. T. Oshima ketimpangan sedang (*moderate*) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Total keseluruhan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tahun 2020 sampai dengan 2021 di Kota Tangerang sebanyak 1.552.162 Jiwa, yaitu mengalami kenaikan sebesar 35,84% dari tahun sebelumnya, terbagi menjadi 3 kategori yaitu rumah tangga, kepala keluarga, dan individu, dimana dari ketiga kategori tersebut Individu merupakan kategori terbanyak yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan persentase sebanyak 79,37%.

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut jenis kelamin pada tahun 2020 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengetahui total dan persentase dari data terpadu kesejahteraan sosial menurut jenis kelamin di Kota Tangerang. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin tahun 2020 sebanyak 191.547 Jiwa, dengan masing-masing Persentase laki-laki sebanyak 46% dan perempuan sebanyak 54%. Sedangkan Kecamatan tertinggi yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut jenis kelamin yaitu Kecamatan Neglasari dengan total 23.698 Jiwa, yang terdiri dari 12,67% laki-laki dan 12,54% perempuan. Selain itu juga terdapat Kecamatan terendah yang terdaftar sebagai DTKS menurut jenis kelamin yaitu Kecamatan Batuceper dengan total 9.919 Jiwa, terdiri dari laki-laki 5,26% dan perempuan 5,11%.

Sementara Data terpadu kesejahteraan sosial menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat tingkat pendidikan nya yaitu SD/ Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi/Sederajat, dan yang tidak terdata. Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020 yaitu SD/Sederajat 30%, SMP/Sederajat 19%, SMA/Sederajat 28%, Perguruan Tinggi/Sederajat 1%, dan tidak terdata 22%. Sehingga dari persentase tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan SD/Sederajat merupakan data tertinggi yang terdaftar dalam data DTKS, dan tingkat pendidikan terendah yang terdaftar dalam DTKS yaitu Perguruan Tinggi/Sederajat. Sedangkan Kecamatan tertinggi yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut tingkat pendidikan yaitu Kecamatan Neglasari dengan total 40.029 Jiwa, yang terdiri dari SD/Sederajat 16,73%, SMP/Sederajat 13,25%, SMA/Sederajat 7,78%, Perguruan Tinggi/Sederajat 7,34%, dan Tidak Terdata 14,75%. Selain itu juga terdapat Kecamatan terendah yang terdaftar sebagai DTKS menurut tingkat pendidikan yaitu Kecamatan Batuceper dengan total 15.210

Jiwa, terdiri dari SD/Sederajat 4,46%, SMP/Sederajat 5,26%, SMA/Sederajat 5,15%, Perguruan Tinggi/Sederajat 5,26%, dan Tidak Terdata 5,15%.

Data terpadu kesejahteraan sosial menurut pekerjaan pada tahun 2020 ini merupakan penduduk Kota Tangerang yang namanya terdaftar dalam data DTKS dengan melihat status pekerjaannya, dimana status pekerjaan terdiri dari 9 jenis pekerjaan, diantaranya PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif, Pekerja Keluarga/Tidak dibayar, Pekerja bebas pertanian, Pekerja non pertanian, Buruh.Karyawan/Pegawai Swasta, Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tetap Tidak Tetap/Tidak Dibayar, Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar, Tidak ada data.

Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut pekerjaan tahun 2020 terdiri dari PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif 0,05%, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar 0,58%, Pekerja Bebas Pertanian 0,14%, Pekerja Non Pertanian 3,58%, Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta 17,55%, Berusaha Sendiri 5,91%, Berusaha Dibantu Buruh Tetap Tidak Tetap/Tidak Dibayar 0,57%, Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar 1,35%, dan Tidak ada data 70,28%. Dari Persentase ini dapat diketahui dari data DTKS menurut pekerjaan bahwa sebanyak 70,28% tidak ada data nya (blank). Selain itu, dapat diketahui bahwa pekerjaan buruh/karyawan/pegawai swasta merupakan status pekerjaan tertinggi yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Kota Tangerang tahun 2020 dengan persentase 17,55%, sedangkan status pekerjaan terendah yang terdaftar di data DTKS yaitu PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif dengan persentase 0,05%.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. status kesejahteraan sosial dibagi menjadi 5 indikator, yaitu:

- 1. Status Kesejahteraan 1** : Sangat Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)

2. **Status Kesejahteraan 2:** Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia)
3. **Status Kesejahteraan 3 :** Hampir Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21% - 30% terendah di Indonesia)
4. **Status Kesejahteraan 4 :** Rentan Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 31% - 40% terendah di Indonesia)
5. **Status Kesejahteraan 5 :** Menuju Middle Class (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 41% + terendah di Indonesia)

Status kesejahteraan sosial di Kota Tangerang tersebar di lima indikator, dimana indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu Kesejahteraan 5+ sebanyak 28.637 Jiwa dengan Persentase 32,64%. Kesejahteraan 5+ ini memiliki arti bahwa Kota Tangerang berada di posisi menuju Middle Class (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 41% + terendah di Indonesia). Sedangkan indikator yang memiliki nilai terendah yaitu Kesejahteraan 2 sebanyak 8.151 Jiwa dengan Persentase 9,29%. Hal ini berarti bahwa 9,29% penduduk Kota Tangerang termasuk dalam kategori Miskin (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11% - 20% terendah di Indonesia) yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada periode Januari hingga April 2021 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Tangerang telah dilaksanakan terdiri dari 4 tahap. Bantuan Sosial Tunai tahap 1 dilaksanakan pada bulan Januari 2021, dimana kecamatan tertinggi pada tahap 1 sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai yaitu kecamatan Pinang sebanyak 15.740 Jiwa, Sedangkan kecamatan terendah

yaitu di Kecamatan Jatiuwung sebanyak 7.042 Jiwa. Kemudian Bantuan Sosial Tunai tahap 2 dilaksanakan pada bulan Februari 2021 dengan kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan sosial tunai yaitu kecamatan Pinang sebanyak 15.669 Jiwa, dan kecamatan terendah yaitu Jatiuwung sebanyak 7.643 Jiwa. Bantuan Sosial Tunai tahap 3 dan 4 dilaksanakan di bulan Maret hingga April 2021, pada tahap ini kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan sosial tunai yaitu kecamatan Pinang sebanyak 20.684 Jiwa, dan kecamatan terendah yaitu Jatiuwung sebanyak 9.657 Jiwa.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Penerima keluarga harapan (PKH) di Kota Tangerang tahun 2021 terdiri dari 2 tahap. PKH tahap 1 dilaksanakan di bulan Januari, dengan total keseluruhan sebanyak 29.801 Jiwa, sedangkan kecamatan tertinggi sebagai penerima keluarga harapan yaitu kecamatan Neglasari sebanyak 5.017 Jiwa, dan kecamatan terendah penerima keluarga harapan yaitu kecamatan Ciledug sebanyak 1.276 Jiwa. Kemudian PKH tahap 2 dilaksanakan di bulan Februari sejumlah 31.429 Jiwa, dan kecamatan tertinggi sebagai penerima keluarga harapan yaitu Neglasari sebanyak 5.255 Jiwa, sedangkan kecamatan terendah penerima keluarga harapan yaitu kecamatan Larangan sebanyak 1.187 Jiwa.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap

bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Total keseluruhan bantuan pangan non-tunai di Kota Tangerang dari bulan Januari hingga Juni 2021 yaitu sebanyak 175.808 Jiwa. Sedangkan dari periode Januari hingga Juni tahun 2021 kecamatan tertinggi sebagai penerima bantuan pangan non tunai yaitu di kecamatan Neglasari sebanyak 25.668 Jiwa, dan kecamatan terendah sebagai penerima bantuan pangan non tunai yaitu kecamatan Larangan sejumlah 7.373 Jiwa.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sedangkan Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun dalam hal ini bantuan yang diberikan berupa beras selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan total penerima keluarga harapan beras sebanyak 32.468 Jiwa, dan penerima bantuan sosial tunai beras sebanyak 170.703 Jiwa.



STATISTIK SEKTORAL

KEMISKINAN MASYARAKAT

KOTA TANGERANG
TAHUN 2021



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Lantai 4 Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman No.1, Suka Asih, Kota Tangerang, 15123**



Telp. 021-55764955



Fax. 021-5569457

www.tangerangkota.go.id www.statistik.tangerangkota.go.id diskominfo@tangerangkota.go.id